

**PANDANGAN ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL “*TESENG*”
PADA MASYARAKAT MANGGALUNG KECAMATAN MANDALLE
KABUPATEN PANGKEP**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

Nur Asnita Wulandari

Nim: 90100116119

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN EKONOMI ISLAM

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Asnita Wulandari
NIM : 90100116119
Tempat/Tgl. Lahir : Manggalung, 1 Agustus 1998
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jl. Samata, Gowa
Judul : PANDANGAN ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL
“TESENG” PADA MASYARAKAT MANGGALUNG
KECAMATAN MANDALLE KABUPATEN PANGKEP

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata Gowa, 24 November 2020

Penyusun

Nur Asnita Wulandari

NIM : 90100116119



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa . ■ 424835, Fax424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pandangan Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil “Teseng” pada Masyarakat Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep”** yang disusun oleh **Nur Asnita Wulandari**, NIM: **90100116119**, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin tanggal 16 November 2020, bertepatan dengan 1 Rabi’ul Akhir 1442 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam.

Samata-Gowa, November 2020

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak. (.....)	
Sekretaris	: Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag. (.....)	
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. (.....)	
Pembimbing II	: Mustafa Umar, S.Ag., M.Ag. (.....)	
Penguji I	: Dr. Amiruddin K, M.El. (.....)	
Penguji II	: Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, MM. (.....)	

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag
NIP. 1966130 199303 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pandangan Islam terhadap praktik bagi hasil “*teseng*” pada masyarakat Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam pada program studi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar.

Sesungguhnya Allah swt maha sempurna dan memiliki segalanya, dan manusia merupakan makhluk yang diciptakan dengan memiliki kemampuan terbatas sehingga tidak luput dari kekurangan, begitupun dengan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, pertama-tama penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua tercinta ayahanda **Usman** dan ibunda **Aisya** yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dalam mendidiknya dan senantiasa memberikan do'a dalam setiap langkahku, serta memberi pengorbanan dan dukungan dalam hidup ini, terima kasih untuk segalanya.

Dengan segala hormat, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih, kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para pembantu Rektor beserta seluruh jajarannya yang senantiasa memberikan berbagai fasilitas yang

menunjang pengembangan mutu dan kualitas Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus sebagai dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Efendi, S.E., M.M., selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan Akademik.
4. Bapak Saiful, S.E., M.SA, A.K., selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, dorongan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Mustofa Umar, S.Ag., M.Ag. selaku dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu bimbingan, arahan dan dorongan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Amiruddin K, M.El. selaku dosen penguji I serta bapak Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, MM. selaku dosen penguji II yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan penilaian dengan memberikan masukan serta bimbingan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan pendidikan serta mengikhlaskan ilmunya disampaikan kepada penulis.
8. Para staf Akademik, yang telah membantu dalam mengumpulkan data yang penulis butuhkan. Walaupun dalam penyelesaian skripsi ini

sebagian pelayanannya dilakukan melalui media daring akibat mewabahnya virus Corona, tetapi tetap memberi kelancaran pelayanan dan urusan Akademik.

9. Bapak Nurzan, S.Sos. selaku Kepala Desa Manggalung, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data-data yang dibutuhkan.
10. Kepada masyarakat Desa Manggalung, walaupun ditengah wabah Virus Corona atau COVID-19 tetapi rela meluangkan waktu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah serta tetap memberikan pengetahuan-pengetahuan, informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian yang dilakukan guna untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, teman-teman program studi Ekonomi Islam angkatan 2016 khususnya teman sekelasku tercinta yang telah berbagi pengalaman baik tangis maupun tawa yang telah dilalui, serta memberi bantuan dan motivasi kepada penulis, kalian luar biasa.
12. Seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya yang telah memberi dukungan dan bantuan baik berupa materi maupun *spirit* kepada penulis agar senantiasa fokus kepada tujuan yang akan dicapai, salah satunya dengan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Bapak Asrul Muslim S.Ag., M.Pd., selaku Dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan arahan dan petunjuk bagi penulis pada saat melaksanakan KKN dan Seluruh teman-teman KKN Reguler angkatan ke-62/63 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2020 yang di tempatkan di Kabupaten Sidrap, khususnya teman-teman posko-4 di

Desa Passeno yang telah mengukir kenangan dan memberikan pengalaman baru bagi penulis.

14. Hj. Andi Nurmi selaku Ibu Kepala Desa Passeno dan Seluruh Masyarakat Desa Passeno yang telah memberi penulis dukungan berupa moril maupun materi dan pengalaman-pengalaman hidup yang tidak terlupakan.

15. Seluruh keluarga dan sanak saudara tercinta, yang tidak lelah memberikan do'a, motivasi, dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bentuk bantuan dan amal baik yang mereka berikan kepada penulis dalam menunjang penyelesaian skripsi ini, agar senantiasa dibalas oleh Allah swt dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda dan diharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan pada penulis khususnya.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Samata, Agustus 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
E. Penelitian Terdahulu	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Konsep Akad dalam Islam	12
1. Rukun dan Syarat Akad	12
2. Macam-macam Akad.....	13
3. Berakhirnya Akad.....	15
B. Kerjasama Pertanian dalam Konteks Islam.....	15
1. <i>Musaqah</i>	17
2. <i>Muzara'ah</i>	19
3. <i>Mukhabarah</i>	22
C. Dasar Hukum Kerjasama (Bagi Hasil) dalam Pertanian	23
1. Pendapat Fuqaha yang Membolehkan	23

2. Pendapat Fuqaha yang Tidak Membolehkan.....	25
D. Konsep ‘Urf.....	27
E. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber Data.....	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Instrumen Penelitian.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Struktur Organisasi Desa Mangalung	37
2. Sejarah Desa	38
3. Kondisi Geografis	40
4. Kondisi Demografis	42
5. Keadaan Ekonomi dan Potensi Desa.....	45
B. Jenis-Jenis Kerjasama Lahan Pertanian pada Masyarakat Manggalung.....	47
1. Macam-Macam Bentuk Kerjasama Pertanian pada Masyarakat Manggalung	47
2. Masa Panen Padi pada Masyarakat Manggalung	49
C. Praktik Bagi Hasil Teseng di Manggalung	51
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Bagi Hasil <i>Teseng</i> di Manggalung.....	52

2. Akad Bagi Hasil <i>Teseng</i>	54
3. Proses dan Biaya Pengelolaan Sawah	57
4. Sistem Bagi Hasil <i>Teseng</i>	62
D. Pandangan Islam terhadap Praktik <i>Teseng</i> di Desa Mangalung.....	66
1. Faktor Pendorong Terjadinya Kerjasama antara Pelaku Akad Bagi Hasil <i>Teseng</i>	67
2. Subjek dan Objek Akad Bagi Hasil <i>Teseng</i>	68
3. Proses Pelaksanaan Bagi Hasil <i>Teseng</i>	70
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
MANUSKRIP	79
LAMPIRAN	81
RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana Desa Manggalung	40
Tabel 4.2 Kondisi Geografis Desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep 2019.....	41
Tabel 4.3 Kondisi Demografis Desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep 2019.....	44
Tabel 4.4 Profesi Masyarakat Manggalung	47
Tabel 4.5 Jenis Bibit/benih yang digunakan pada Musim Hujan.....	49
Tabel 4.6 Jenis Bibit/benih yang digunakan pada Musim Kemarau.....	51
Tabel 4.7 Biaya Pengeluaran Pengelolaan Sawah	61
Tabel 4.8 Pembagian Hasil Pertanian dengan akad <i>Teseng</i>	65



ABSTRAK

NAMA : NUR ASNITA WULANDARI
NIM : 90100116119
JUDUL : PANDANGAN ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL “TESENG” PADA MASYARAKAT MANGGALUNG KECAMATAN MANDALLE KABUPATEN PANGKEP

Penelitian ini terkait dengan Bagi hasil *teseng* yaitu bagi hasil pertanian dimana hasil panennya dibagi antara pemilik dengan penggarap sawah dan bibit benihnya ditanggung oleh penggarap sawah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan Islam terkait praktik bagi hasil *teseng* tersebut, dimana dalam penerapannya masih dilakukan secara adat setempat baik dari segi waktu berakhirnya akad yang tidak ditentukan dan tidak adanya saksi pada saat ijab kabul berlangsung. Faktor yang melatar belakangi kerja sama dengan bagi hasil *teseng* ini yaitu atas dasar tolong menolong dan adanya kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu cara atau teknik pengolahan data yang bersifat uraian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif dan sosial karena meneliti bagi hasil adat yang dilakukan dalam masyarakat dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis. Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisa data yang dilakukan penelitian ini berdasarkan analisis data kualitatif yang dilakukan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, model data dan verifikasi kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil *teseng* yang di praktikkan secara umum dalam masyarakat sejalan dengan akad *mukhabarah* yaitu pemilik lahan menyerahkan hak pengelolaan lahannya kepada pekerja lahan dengan biaya proses dan bibit benih ditanggung oleh pekerja lahan. Pandangan Islam mengenai praktik *teseng* ini adalah sah karena rukun dalam perjanjian ini sudah terpenuhi. Dalam perjanjian ini sudah jelas ketentuan objek dan subjek serta rasio pembagian hasil panen sebelum kerja sama ini dimulai. Namun ditinjau dari keabsahan akadnya bagi hasil *teseng* ini termasuk akad yang *fasid* karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi yakni penentuan lamanya kerja sama berlangsung. Tetapi secara keseluruhan banyak manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan bagi hasil *teseng* ini dimana didalamnya terkandung sikap saling *ridha* dimana transparansi dalam pelaksanaan akadnya terlaksana, nilai tolong menolong dan saling memberi manfaat antara kedua belah pihak dimana pemilik menyediakan lahan untuk dikelola dan penggarap lahan menyediakan modal tenaga.

Kata Kunci : Bagi Hasil “Teseng”, Mukhabarah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang universal, karena syariat Islam mencakup seluruh sendi kehidupan baik dalam ibadah maupun muamalah. Dalam hal muamalah, manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk sosial yang senantiasa berada dalam lingkungan pergaulan dengan manusia lainnya dan tidak mampu hidup tanpa kehadiran dan bantuan satu sama lain. Manusia diciptakan dengan segala keterbatasan yang dimiliki tentu saling membutuhkan satu sama lain dan di anjurkan agar saling bekerja sama dan tolong menolong antar sesama, sebagaimana dalam QS. Al- Maidah/5: 2 Allah swt berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ..

Terjemahannya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹

Dalam bekerja sama dengan orang lain, salah satunya melalui kerja sama bagi hasil yang menggunakan kepercayaan antara kedua belah pihak sebagai modal awal. Hal penting yang harus diperhatikan yaitu suatu perjanjian yang mengikat untuk menopang dan memperkuat kepercayaan tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum Islam perjanjian dikenal dengan istilah akad yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau

¹Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kementrian Agama: Direktorat urusan Agama Islam, 2012), h. 106.

tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.² Pelaksanaan akad tersebut yang dilandasi dengan kepercayaan dijelaskan Allah swt dalam QS. al-Baqarah/2: 283:

.... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

Terjemahannya:

...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...³

Masyarakat menjalankan aktivitasnya dalam bekerja tentu sangat dipengaruhi dengan keadaan suatu negara atau daerah dimana mereka bermukim, tidak terkecuali dengan Indonesia yang merupakan negara Agraris, sehingga mayoritas penduduk khususnya yang bermukim di pedesaan rata-rata bekerja dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Dengan demikian, masyarakat harus saling membantu dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja sama, salah satunya melalui perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian. Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pemilik modal atau lahan dengan pekerja.⁴

Sektor pertanian dan pedesaan memiliki peran yang sangat strategis dalam pertumbuhan ekonomi. Melihat pentingnya sektor pertanian dan pedesaan, selain sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar penduduk, sektor pertanian dan pedesaan juga mampu meningkatkan sumbangan kepada PDB (Produk Domestik Bruto), memberikan kontribusi terhadap ekspor (Devisa). bahkan ketika terjadi krisis moneter, sektor pertanian dan pedesaan mampu menjadi penyangga perekonomian nasional.⁵

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 72.

³Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kementrian Agama: Direktorat urusan Agama Islam, 2012), h. 49.

⁴Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 34.

⁵Soekartwi, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya* (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2001), h. 10.

Dalam hukum Islam, kerja sama dalam bidang pertanian merupakan bagian dari bentuk syirkah, dimana satu pihak menyediakan lahan dan pihak lain sebagai penggarap tanah berdasarkan prinsip bagi hasil.⁶ Akad kemitraan dalam Islam dikenal dengan istilah *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Musaqah* merupakan kerja sama antara pemilik lahan dengan menyerahkan lahannya untuk dipelihara oleh penggarap dengan hasil dibagi dua antara keduanya. Adapun *muzara'ah* kerja sama antara pemilik dan penggarap dengan benih di tanggung oleh pemilik lahan sedangkan *mukhabarah* benih ditanggung oleh penggarap. Pengelolaan tanah oleh bukan miliknya dapat dilakukan melalui gadai, usaha, bagi hasil, menumpang, dan sewa tanah pertanian sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) butir h dan pasal 53 ayat (1) UUPA.⁷

Manggalung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep yang mayoritas masyarakatnya menyangand profesi sebagai petani. Tidak menutup kemungkinan dalam suatu daerah ada si miskin dan si kaya, begitupun di Desa Manggalung. Sehingga dengan segala kelebihan rezeki dan materi yang diberikan oleh Allah swt kepada si kaya tentu dianjurkan untuk menolong saudaranya yang sedang kekurangan materi dalam hal ini si miskin, sebagaimana hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Muslim berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ
فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ ،
مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)⁸

⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 218.

⁷Rizka Nurmadany, *Jurnal Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kab. Saleman*, 19 (Desember 2016), h. 1. <https://e-journal.uajy.ac.id/11514/1/jurnal%20HK10859.pdf> (Diakses 26 November 2019).

⁸Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Cet. 1; Riyadh: Baitul al Afkar ad-Dauliyah, 1998 M/1419 H), h. 1082.

Artinya:

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”.

Dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda ada sebagian penduduk yang memiliki keahlian dalam hal bertani tetapi tidak memiliki lahan atau sawah yang cukup untuk di kelola. Namun tidak sedikit penduduk lainnya yang memiliki lahan luas tetapi tidak memiliki waktu atau kemampuan yang cukup untuk mengolah lahannya. Hal ini yang mendorong kerjasama bagi hasil di desa tersebut.

Menurut hasil wawancara awal dengan salah satu masyarakat setempat, bagi hasil yang diterapkan masih tradisional dengan sistem bagi hasil berdasarkan adat setempat. Bagi hasil adat di Manggalung dikenal dengan istilah *teseng*. Akad dalam praktik *teseng* juga masih dilakukan secara lisan, tanpa adanya perangkat hukum yang mendukung. Sehingga hal itu dapat memicu hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi misalnya menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak yang terkait. *Teseng* merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Menurut Muhammad, Hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis yang bersumber pada kebudayaan dan pandangan hidup dan merupakan pedoman bagi sebagian besar orang, baik yang ada di kota terutama di desa.⁹

Dalam Fiqh muamalah, tradisi dikenal sebagai istilah *al-Urf*. Secara etimologi kata *Urf* berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah *al-Urf* berarti: “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik

⁹Andi Sri Wahyuni, “Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat Syariah”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4, No. 3 (Desember 2013), h. 467. <https://scholar.google.co.id> (26 November 2019).

berupa perbuatan maupun perkataan”.¹⁰ Istilah *Urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-adah* (adat istiadat).

Sistem bagi hasil garapan sawah di Manggalung ini tidak jauh berbeda dengan sistem bagi hasil di beberapa desa di Kecamatan Mandalle pada umumnya. Bagi hasil tersebut sudah memiliki ketentuan persentase antara pemilik lahan dengan petani penggarap hal tersebut tergantung kepada musim penanaman padi. Adapun Pembagian hasil panen sesuai dengan pendapatan panen yang dihasilkan. Dalam hal batasan waktu, perjanjian kerjasama juga tidak memiliki kejelasan kapan kerjasama berakhir, karena sistem yang berlaku di masyarakat hanya berdasarkan kecocokan dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Hal itu tentu bertentangan dengan syariat Islam dimana terdapat *gharar* yang dapat mengundang perkara-perkara yang tidak diinginkan yang dapat merugikan salah satu pihak dan lain sebagainya dalam kerja sama tersebut.

Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia yang menuntun umatnya agar senantiasa bersinergi dengan Al-Qur'an dan hadis. Untuk itu, penulis merasa perlu mengangkat permasalahan ini menjadi suatu masalah penelitian untuk mengetahui bagaimana perspektif Islam mengenai praktek dalam melakukan kerja sama bagi hasil yakni “*Teseng*” pada masyarakat Mangalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana “Pandangan Islam terhadap Praktek Bagi Hasil “*Teseng*” pada Masyarakat Manggalung Kecamatan

¹⁰Abdul Hakim, “Kearifan Lokal dalam Ekonomi Islam: Studi Atas Aplikasi al-Urf Sebagai Dasar Adopsi”, *Jurnal Akademika*, Vol. 8, No. 01 (Juni 2014), h. 71. <http://journal.unisla.ac.id/pdf> (26 November 2019).

Mandalle Kabupaten Pangkep”. Adapun yang menjadi sub masalah dari penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem bagi hasil “*Teseng*” pada masyarakat Manggalung Kec. Mandalle Kab. Pangkep?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap praktik bagi hasil “*Teseng*” pada masyarakat Manggalung Kec. Mandalle Kab. Pangkep?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam menjalankan suatu aktivitas tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Begitupun dengan penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil “*Teseng*” pada masyarakat Manggalung Kec. Mandalle Kab. Pangkep.
- b. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap praktik “*Teseng*” pada masyarakat Manggalung Kec. Mandalle Kab. Pangkep.

2. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan ada banyak manfaat bagi berbagai kalangan, diantaranya:

a. Bagi peneliti

Dapat memberikan pemahaman kepada penulis sebagai peneliti terkait permasalahan dalam praktik bagi hasil “*Teseng*” yang ditinjau dalam perspektif Islam pada masyarakat Manggalung Kec. Mandalle Kab. Pangkep.

b. Bagi petani

Menambah pengetahuan dan informasi mengenai sistem pertanian yang baik menurut hukum Islam, sehingga dapat mengembangkan sistem pertanian di dalam masyarakat agar menjadi lebih baik.

c. Bagi masyarakat luas

Menambah wawasan secara umum mengenai bagi hasil di bidang pertanian dan sistem bagi hasil “*Teseng*” pada masyarakat Manggalung yang baik menurut tinjauan hukum Islam.

d. Bagi pembaca

Menambah informasi tentang sektor pertanian, terutama dalam sistem bagi hasil yang baik sesuai hukum Islam dan mengetahui transaksi pertanian yakni “*Teseng*” yang dipraktekkan masyarakat di Desa Manggalung Kec. Mandalle Kab. Pangkep.

D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk meneliti Pandangan Islam terhadap praktik bagi hasil “*Teseng*” pada masyarakat Manggalung Kec. Mandalle Kab. Pangkep.

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang:

1. Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pemilik modal atau lahan dengan pekerja.¹¹
2. Menurut fikih Islam bagi hasil dikenal dengan istilah *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*.
 - a. *Musaqah* ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya sesuai dengan perjanjian yang disepakati.¹²
 - b. Syafi'iyah mendefinisikan *muzara'ah* yaitu pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pemilik tanah.¹³

¹¹Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 34.

¹²H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ed. Li Sufyana dkk (Cet. 62; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 300.

- c. *Mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.¹⁴
- d. *Teseng*, yaitu bagi hasil yang hasil pertanian dimana hasil panennya dibagi antara pemilik dengan penggarap sawah dan bibit benihnya ditanggung oleh penggarap sawah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun menurut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan apa yang diteliti yaitu penelitian yang dilakukan Abdul Mutalib dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzara’ah* dan *Mukhabarah* pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur”.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konsep bagi hasil nyakap yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pelaksanaannya sebagai berikut: konsep nyakap yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pada dasarnya sama dengan konsep *Muzara’ah* dan *Mukhabarah* yang ada dalam Islam dengan pelaksanaannya sebagai berikut: Akadnya dilakukan hanya dengan mengucapkan dengan lisan saja, biaya ada dua macam yakni biaya keseluruhan dari pemilik lahan (*Muzara’ah*) dan biaya yang ditanggung oleh penggarap (*Mukhabarah*), sedangkan untuk pembagian hasil dilaksanakan dengan mengurangi biaya

¹³Syamsudin Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbini, “Mughni Al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfazh al-Minhaj”, dalam Isnawati Rais dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS* (Cet.I; [t.d]), h. 134.

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2010), h. 117.

¹⁵Abdul Mutalib, “Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzara’ah* dan *Mukhabarah* pada Usaha tani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur”, *JIME*, Vol.1, No. 2, (Oktober 2015).

pengerjaan terlebih dahulu dan alokasi bagi hasil ini masih pada tatanan konsumsi bagi penggarap lahan dan bagi pemilik lahan alokasinya lebih terarah kepada persediaan untuk masa depan, dengan menabungkan hasil dari pembagian usaha tani padi tersebut. Dalam tatanan kesejahteraan petani penggarap lahan di Kecamatan Praya Timur baru terpenuhi pada tatanan kebutuhan dharuriyah nya saja. Sedangkan pemilik lahan sudah lebih kompleks dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai standar melihat kesejahteraannya.

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Jannahar Saddam Ash Shidiqie, dengan judul “Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam”.¹⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1960 dan hukum Islam. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil sawah di Kecamatan Gamping secara umum dilakukan secara lisan, atas dasar kepercayaan, dan tanpa saksi. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah “*maro*” (1/2 bagian untuk penggarap dan 1/2 bagian untuk pemilik) dengan seluruh biaya ditanggung oleh penggarap. Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh penggarap. Hasil pertanian yang mencapai nisab tidak langsung disisihkan zakatnya. Hambatan yang ditemui ialah kurangnya sosialisasi dari pihak manapun terkait UU. No. 2 dan hukum Islam dalam kerjasama pertanian, adanya kebiasaan turun temurun yang diikuti walaupun dilain pihak ada yang merasa dirugikan.

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Firman Muh. Arif “*Muzara’ah* dan pengembangan umat di pedesaan”.¹⁷ Hasil penelitian ini

¹⁶Jannahar Saddam Ash Shidiqie, “Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. VII, No. 1 (Juni 2017), h. 22-31.

¹⁷Firman dan Muh. Arif, “Muzara’ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan”, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 2 (September 2018). <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index> (Diakses 10 Februari 2020).

menunjukkan Pemberlakuan *muzara'ah* di era masyarakat modern dilakukan dengan mekanisme yang relevan dengan perkembangan yang ada namun tetap konsisten dengan dasar dan nilai idealitas Islam. Penerapan *muzara'ah* bukan lagi sebatas bidang pertanian dan berpotensi dikembangkan dalam berbagai bidang lain dengan prinsip dasar bagi hasil. Penerapan *muzara'ah* bertujuan untuk meminimalisir lahan-lahan yang tidak diberdayakan, memakmurkan tanah yang termarginal, menyerap tenaga kerja bagi yang kompeten mengelola namun tidak memiliki lahan, mereduksi kesenjangan antara pemilik modal dan lahan dengan penggarap, dan mendorong produktivitas lahan. Revitalisasi *muzara'ah* menunjukkan bahwa konsep tersebut masih bisa eksis di masa sekarang dengan memodernisasi teknik operasionalnya, melembagakan *muzara'ah* supaya dampaknya bersifat praktis dan berguna bagi umum, berhaluan ke arah perbaikan keadaan dan menghadirkan Islam yang komprehensif.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Andi Sri Wahyuni dengan judul penelitian “Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah”.¹⁸ Penelitian ini menganalisis kasus menggunakan lima indikator yakni transparansi, nisbah bagi hasil yang proporsional, konsisten, *bargaining power* yang seimbang, dan ada ganti rugi jika petani diberhentikan. Konsep penyesuaian bagi hasil adat dengan syariah ialah dengan mengangkat nilai-nilai positif dari kearifan budaya lokal yang disempurnakan dengan konsep syariah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ramadhani Alfin Habibie yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil dari Lahan Plasma Sawit”.¹⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan kerjasama perkebunan

¹⁸Andi Sri Wahyuni, “Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol.4 No. 3 (Desember 2013).

¹⁹Ramadhani Alfin Habibie, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil dari Lahan Plasma Sawit”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 10, No. 1 (2019).

sawit dapat dimasukkan dalam akad *mukhabarah* yaitu bentuk kerja sama antara pengelola kebun dan pemilik lahan. Beberapa rukun dan syarat sebagian telah terpenuhi, namun ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu pada tanah yang akan ditanami tidak memiliki kepastian letak. Ketidakpastian ini yang menyebabkan kurang sempurnanya syarat *mukhabarah*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Akad dalam Islam

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti tekad seseorang untuk melaksanakan sesuatu baik secara sepihak seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.²⁰

Menurut Bahasa akad mempunyai beberapa arti yaitu mengikat, sambungan dan janji. Janji (ahdu) dijelaskan dalam QS. Al-Maidah/5: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Terjemahannya:

Hai orang-orang beriman tepatilah janji-janjimu.²¹

Sedangkan menurut termonologi, akad merupakan ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang disyari'atkan yang didasarkan dengan keridhaan kedua belah pihak.²² Jadi, akad merupakan langkah awal yang dilakukan untuk memulai suatu kerjasama yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati.

1. Rukun dan Syarat Akad

Menurut mayoritas ulama, rukun akad terdiri atas tiga unsur:

- a. *Shighat* (pernyataan ijab dan qabul).
- b. *'Aqidan* (dua pihak yang melakukan kontrak).
- c. *Ma'qud 'alaih* (objek kontrak).

²⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 72.

²¹Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kementrian Agama: Direktorat urusan Agama Islam, 2012), h. 106.

²²H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 11; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 46.

Disamping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad sempurna, Adapun syarat-syaratnya adalah:²³

- a. Syarat adanya sebuah akad terbagi atas dua syarat umum dan khusus, sebagai berikut:
 - 1) Terpenuhinya rukun akad dengan segala ketentuannya.
 - 2) Akad bukan suatu yang terlarang, seperti mengandung unsur khilaf, paksaan, penipuan, dan penyamaran.
 - 3) Akad harus bermanfaat. Adapun syarat khususnya akad tertentu dianjurkan dilaksanakan dihadapan saksi berdasarkan firman Allah dalam QS. *al-Baqarah*/2:282.
- b. Syarat sah akad, para fuqaha menyatakan bahwa akad tidak mengandung lima hal yang merusak sahnya terjadinya akad, yaitu: ketidakjelasan, paksaan, penipuan, adanya hal yang membahayakan dan membatasi kepemilikan terhadap suatu barang.
- c. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad, yaitu akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syaratnya dimana objek akad dimiliki atau adanya otoritas untuk mengadakan akad dan tidak terdapat hak orang.
- d. Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).

2. Macam-Macam Akad

Bentuk akad dalam kitab-kitab fiqh memiliki banyak variasi, secara garis besar berikut akan diuraikan pengelompokan jenis-jenis akad:

- a. Akad menurut tujuannya:

²³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 74.

- 1) Akad *Tabarru*, yaitu akad yang bertujuan untuk tolong-menolong demi mendapatkan ridha dan pahala dari Allah swt, sama sekali tidak ada unsur mencari keuntungan. Misalnya, hibah, wakaf, wasiat, wakalah, rahn, kafalah, hawalah dan qardul hasan.
 - 2) Akad *Tijari* yaitu akad yang berorientasi pada keuntungan dimana rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Misalnya, murabahah, salam, istishna, ijarah muntahiya bittamlik, mudharabah dan musyarakah.²⁴
- b. Akad menurut keabsahannya:
- 1) Akad *shahih*, akad yang terpenuhi syarat dan rukunnya.
 - 2) *Fasid*, yaitu akad yang rukunnya terpenuhi tetapi salah satu syaratnya tidak terpenuhi.
 - 3) *Bathal*, yaitu akad dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi sehingga otomatis syaratnya tidak terpenuhi.²⁵
- c. Akad menurut disyari'atkan dan tidaknya akad:
- 1) *Musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara seperti jual beli dan gadai.
 - 2) *Mamnu'ah* ialah akad yang dilarang syara seperti menjual anak binatang dalam kandungan.²⁶
- d. Akad menurut kedudukannya:
- 1) Akad pokok (*al-'aqd al-ashli*), yaitu akad yang berdiri sendiri tidak bergantung kepada suatu hal lain. seperti jual beli, wadi'ah dll.
 - 2) Akad *asesoir* (*al-'aqd at-tab'i*), yaitu akad yang tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. seperti al-kafalah (penanggungan) dan gadai.²⁷

²⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 77.

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 78.

²⁶H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 53.

3. Berakhirnya Akad

Hal-hal yang menjadi Penyebab berakhirnya akad yaitu karena adanya *fasakh* dan *infisakh*. Berikut akan diuraikan satu persatu terkait hal tersebut:²⁸

a. Berakhirnya akad dengan *fasakh*

Fasakh yaitu dengan “melepaskan perikatan kontrak” atau menghilangkan atau menghapuskan kontrak secara total seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi. *Fasakh* menjadikan pihak yang berkontrak dan objek kontrak kembali ke status semula. Pemutusan kontrak dapat terjadi karena atas dasar kerelaan, secara paksa atas dasar putusan hakim.

b. Berakhirnya akad dengan *infisakh*

Infisakh berarti putus dengan sendirinya (putus, putus demi hukum) atau karena sebab-sebab darurat, seperti masa kontrak telah selesai, pelaku meninggal dan kontrak tidak dapat dilanjutkan.

B. Bagi Hasil Pertanian

Kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan (diperbuat); sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian. Sedangkan Kerja Sama yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dsb) untuk mencapai tujuan bersama.²⁹ Dalam hal ini, kerja sama yang dimaksud penulis yaitu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat petani padi di Manggalung dalam hal ini pemilik

²⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 81-82.

²⁸Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 186.

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 681.

sawah dan petani penggarap dengan tujuan yang sama yaitu untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.

Kerja sama bagi hasil diatur dalam undang-undang No. 2 Tahun 1960, didalamnya terdapat ketentuan umum yang terdiri atas lima bagian; 1) pengertian tanah pertanian; 2) pengertian pemilik tanah; 3) pengertian perjanjian bagi hasil; 4) pengertian hasil tanah; dan 5) pengertian petani.³⁰ Berikut uraiannya:

1. Tanah pertanian adalah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan.³¹
2. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.³²
3. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dilakukan antara pemilik dan penggarap dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dan hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap.³³
4. Hasil tanah adalah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak (baca: bajak) serta biaya menanam panen.³⁴
5. Petani adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian,³⁵ termasuk di dalamnya buruh tani.

³⁰H. Maulana Hasanuddin dan H. Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 180.

³¹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, Pasal 1, No. 1.

³²Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, Pasal 1, No. 2.

³³Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, Pasal 1, No. 3.

³⁴Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, Pasal 1, No. 4.

³⁵Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, Pasal 1, No. 5.

Dalam Islam kerjasama dalam usaha pertanian memiliki berbagai macam istilah, diantaranya yaitu *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah* sebagai berikut:

1. *Musaqah*

Musaqah dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya agar mendapatkan kemaslahatan dan bagian dari hasil yang diurus sebagai imbalan.³⁶

Musaqah adalah kerja sama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.³⁷ Secara etimologi *musaqah* berarti perikatan atas beberapa pohon kepada orang yang menggarapnya dengan ketetapan hasil itu menjadi milik bersama (pemilik pohon dan penggarap).

a. Rukun dan Syarat *Musaqah*

Hanafiyah berpendapat, rukun *musaqah* adalah ijab dan kabul, sedangkan jumhur ulama menyatakan rukun *musaqah* ada lima yaitu sebagai berikut:

- 1) Dua orang yang berakad.
- 2) Objek *musaqah*.
- 3) Pekerjaan.
- 4) Bagi hasil.
- 5) *Shighat*.

Adapun syarat-syarat *musaqah* akan diuraikan sebagai berikut:³⁸

- 1) Pelaku akad disyaratkan cakap hukum dan berakal.

³⁶H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 145.

³⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), h. 243.

³⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 226.

- 2) Objek *musaqah* harus jelas jenis tanaman dan keadaannya. Menurut Hanafiyah objek *musaqah* adalah tanaman yang dapat hidup selama satu tahun atau lebih, tanaman yang berbuah, seperti kurma dan anggur, apel dan sejenisnya. sementara Malikiyyah menyatakan objek akad *musaqah* merupakan tanaman tua dan muda (palawija), baik menghasilkan buah maupun tidak menghasilkan buah.
- 3) Bagi hasil berupa buah dari pohon yang dipelihara, disyaratkan hasilnya untuk dua orang yang berakad. Tidak sah apabila hasilnya diperuntukkan sebagian untuk orang yang tidak terlibat dalam akad.
- 4) Pembagian hasil tanaman harus jelas ketika akad, seperti seperdua, sepertiga dan sebagainya.
- 5) Petani/penggarap bebas dalam pekerjaannya dan diserahkan sepenuhnya kepadanya.
- 6) Akad *musaqah* dilakukan sebelum tanaman belum siap panen, karena jika layak panen maka dikenakan akad ijarah.
- 7) Jangka waktu perjanjian harus jelas. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asyaibani, penetapan waktu merupakan suatu keharusan tetapi tergantung pada kebiasaan tanaman.
- 8) *Shighat* disyaratkan jelas menunjukkan makna *musaqah*. Sementara itu, Hanabilah membolehkan akad *muzara'ah*, *musaqah* dengan lafal ijarah, yakni mengupahkan pemeliharaan tanah berdasarkan bagi hasil.

b. Berakhirnya Akad *Musaqah*:

- 1) Berakhirnya masa akad *musaqah*.
- 2) Meninggalnya salah satu pihak yang berakad. ketika tanaman belum panen maka boleh dilanjutkan ahli waris penggarap. Tetapi jika yang

meninggal pemiliknya, petani tetap melanjutkan akad sampai pekerjaan selesai.

- 3) Ada *uzur* yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melanjutkan akad. Menurut Malikiyah akad *musaqah* tidak batal hanya Karena pihak petani *uzur*. Syafi'iyah juga berpendapat bahwa *uzur* tidak membatalkan akad.³⁹

2. *Muzara'ah*

Muzara'ah menurut bahasa adalah *mufaalah min az-zar'i* berarti bekerja sama dalam bidang pertanian. Menurut Hanafiyah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Sedangkan menurut Hanabilah *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Sementara menurut Malikiyah *muzara'ah* ialah bersekutu dalam akad. Menurut pendapat Al-syafii *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Pendapat lain diungkapkan oleh Syaikh Ibrahim al Bajuri yang berpendapat bahwa Al *Muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.⁴⁰

Menurut Muhammad Yusuf al-Qordhawi, *muzâra'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan.⁴¹

³⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 227-228.

⁴⁰H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 155.

⁴¹Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam Terj. Abu Sa'id Al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid* (Jakarta: Rabbani Press, 2000), h. 383.

Sementara itu menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih As Sunnah* mendefinisikan *muzara'ah* dengan pemberian hak untuk menanam tanah yang dipunyai kepada orang lain dengan syarat bahwa dia akan mendapatkan bagian tertentu dari apa yang dihasilkan dari tanahnya baik setengah, sepertiga, atau lebih banyak atau kurang dari hasil yang diperoleh berdasarkan kesepakatan bersama antara orang yang memiliki tanah dan yang menggarapnya.⁴²

Menurut Adiwarman Karim dalam bukunya *Bank Islam*, *Muzara'ah* adalah bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun.⁴³ Sedangkan menurut Rahman, *muzara'ah* diartikan sebagai sewa dalam bentuk kerjasama bagi hasil terhadap tanah pertanian, sementara itu dalam perbankan syariah dikatakan bahwa *muzara'ah* diidentikan dengan *mukhabarah*, hanya saja pada *muzara'ah* benih atau bibit tanamannya berasal dari pemilik lahan.⁴⁴

Jadi, *muzara'ah* merupakan kerjasama dalam bidang pertanian dimana pemilik sawah menyerahkan sawahnya dikelola oleh petani penggarap dengan bibit benih ditanggung oleh pemilik sawah dan pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama.

a. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* menyatakan rukun *muzara'ah* yaitu: pelaku akad (pemilik lahan dan penggarap), objek (benih, lahan,

⁴²Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah jilid 5* (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), h. 250.

⁴³Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 78.

⁴⁴Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005), h. 326.

dan hasil pertanian), dan *Shighat* (ijab dan kabul). Adapun syarat-syarat *muzara'ah* adalah sebagai berikut:⁴⁵

1) Pihak yang berakad:

- a) Berakal.
- b) Hanafiyah mensyaratkan tidak murtad, sedangkan muridnya Abu Yusuf dan Muhammad as-Syaibani tetap sah akad *muzara'ah* walaupun salah seorang murtad.

2) Objek *muzara'ah*:

- a) Benih, diketahui jenis benih dan menurut kebiasaan bila ditanam dapat tumbuh dan menghasilkan.
- b) Lahan dapat ditanami atau diolah, diketahui batas-batasnya dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada petani.
- c) Objek *muzara'ah* disyaratkan harus jelas, apakah objek tersebut berupa jasa petani maupun manfaat lahan.⁴⁶

3) Hasil pertanian disyaratkan:

- a) Menjadi hak berserikat antara petani dan pemilik lahan, maka hasil pertanian berhak dimiliki keduanya tidak boleh hanya milik pihak tertentu saja.
- b) Kadar pembagian jelas seperti separuh, sepertiga atau sejenisnya.
- c) Batas waktu *muzara'ah* harus jelas dan sesuai dengan masa dan kebiasaan pengolahan tanaman.

b. Bentuk-Bentuk *Muzara'ah*

Bentuk-bentuk *muzara'ah* ada empat, yakni:⁴⁷

⁴⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 221.

⁴⁶H. Maulana Hasanuddin dan H. Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, h. 170.

⁴⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 222.

- 1) Lahan dan bibit dari pemilik lahan, sedangkan kerja dan peralatan pertanian dari petani. Bentuk akad *muzara'ah* seperti ini dibolehkan karena petani menerima hasil pertanian karena jasanya.
 - 2) Pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, bibit, peralatan pertanian dan kerja dari petani. Akad ini boleh karena objek akad ini adalah manfaat lahan pertanian.
 - 3) Lahan, bibit dan peralatan dari pemilik dan kerja dari petani. Akad ini boleh karena objek akad ini adalah jasa petani.
 - 4) Lahan pertanian dan peralatan pertanian dari pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani akad ini tidak sah, karena peralatan pertanian harus mengikut kepada petani bukan pemilik. Manfaat alat adalah untuk mengolah lahan pertanian.
- c. Berakhirnya akad *muzara'ah* diantaranya karena berakhirnya waktu akad, salah seorang yang berakad meninggal dunia, dan sebab *fasakh* misalnya pemilik lahan menjual objek akad karena terlilit hutang dan jika pemilik harus bepergian jauh sehingga ia tidak dapat melangsungkan akad.⁴⁸

3. *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.⁴⁹ *Mukhabarah* menurut dahir nash, al-Syafi'i adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.

⁴⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 223-224.

⁴⁹Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. 2, h. 117.

C. Dasar Hukum Kerjasama (Bagi Hasil) dalam Pertanian

1. Pendapat Fuqaha yang Membolehkan

a. *Musaqah*

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang di perbolehkan dalam *musaqah*. Imam Abu Dawud berpendapat yang boleh di-*musaqah*-kan hanya kurma. Syafi'iyah berpendapat yang boleh hanya kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiyah dan Imam Malik, semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di *musaqah*-kan. Imam Hanbali berpendapat bahwa *musaqah* diperbolehkan untuk semua pohon baik pohon yang tadah hujan maupun yang perlu disiram dan semua pohon yang buahnya dapat dimakan.⁵⁰ Berikut landasan hukum yang menjadi rujukan atas kebolehan akad *musaqah*:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَ أَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا.⁵¹

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah saw bahwa beliau telah menyerahkan pohon kurma khaibar beserta tanahnya kepada orang Yahudi untuk mereka kelola, dengan biaya pemeliharaan dari mereka, namun beliau berhak memperoleh sebagian dari buah (hasil panennya).”

b. *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Landasan hukum atas kebolehan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* merujuk kepada al-Quran dan Hadis. Berikut beberapa landasan hukum Mengenai kebolehan dalam mengadakan kerja sama bagi hasil terdapat dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عُمَرُو: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، فَقَالَ: أَيُّ عُمَرُو، أَحْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ - يَعْنِي

⁵⁰H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 149.

⁵¹Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Muslim jilid 3* (Cet 1; Jakarta: Pustaka as- Sunnah, 2010), h. 75.

ابْنُ عَبَّاسٍ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، إِنَّمَا قَالَ: إِنْ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (8154), وَالنَّوَوِيُّ (158/10))⁵²

Artinya:

“Dari Thawus r.a bahwa ia suka mukhabarah. Amru berkata: Lalu aku katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi S.A.W telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi S.A.W tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (H.R Muslim 1548. An-Nawawi 10/156-158).

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn Asy-Syaibani, keduanya adalah sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa akad *muzara'ah* hukumnya boleh karena akadnya cukup jelas yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah. Menurut mereka akad ini bertujuan saling membantu antara petani dan pemilik tanah pertanian. Dimana Pemilik tanah tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan lahannya, sementara petani tidak mempunyai lahan untuk bertani. Oleh sebab itu wajar apabila pemilik tanah persawahan bekerjasama dengan petani penggarap dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama.

Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama dalam membolehkan akad *muzara'ah* adalah hadis Nabi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِرُحْمَهِ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَحْبَبَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ⁵³

Artinya:

⁵² Al-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al-Mundzir, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Cet. 1; Surakarta: Insan Kamil Solo, 2012), h. 479.

⁵³ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits: Sahih Muslim 2*, (Cet. 1; Jakarta: Almahira, 2012), h. 25, Hadis ke-3963.

“Ahmad bin Hanbal dan Zuhair bin Harb menyampaikan kepada kami - lafaz milik zuhair- dari Yahya al-Qathan, dari Ubaidullah, Nafi’ mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah Saw. memperkerjakan penduduk khaibar dengan upah setengah dari hasil tanah tersebut berupa kurma atau gandum”.

Adapun tujuan dilakukannya akad muzara’ah menurut mereka ialah untuk saling tolong-menolong sesama manusia yakni antara pemilik lahan dan petani penggarap, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al- Maidah/5: 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ..

Terjemahannya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵⁴

2. Pendapat fuqaha yang Tidak Membolehkan

Imam Abu Hanifah dan Zufar (728-775 M) berpendapat bahwa hukum *muzara’ah* adalah tidak boleh (*gair ja’iz*). Hal itu dikarenakan *muzara’ah* dengan bagi hasil seperti seperempat, seperdua atau sepertiga hukumnya batal. Syafi’iyah juga berpendapat bahwa hukum *muzara’ah* tidak sah, kecuali akad tersebut diikuti dengan akad musaqah: yakni kerja sama pemilik lahan dengan penggarap mengenai pemeliharaan/pengolahan tanaman/pepohonan yang ada di lahan tersebut, yang hasilnya di bagi menurut kesepakatan bersama.⁵⁵

Landasan hukum yang digunakan oleh mereka adalah hadis Nabi Saw:

⁵⁴Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Kementrian Agama: Direktorat urusan Agama Islam, 2012), h. 106.

⁵⁵H. Maulana Hasanuddin dan H. Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, h. 167.

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ⁵⁶

Artinya:

“Dari Jabir sesungguhnya Nabi Saw melarang mukhabarah”.

Dalam Hadis Nabi saw di jelaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمَزَارَعَةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ⁵⁷

Artinya:

“Dari Abdullah Ibn as-Saib ia berkata, saya bertanya kepada Abdullah ibn Ma’qil tentang muzara’ah, Abdullah menjawab: Tsabit ibn al-Dhahak telah menceritakan kepadaku sesungguhnya Nabi Saw melarang muzara’ah”.

Menurut al-Syafi’iyah haram hukumnya melakukan *muzara’ah*

kecuali akad *muzara’ah* mengikut kepada akad *musaqah*. Landasan hukumnya berpatokan pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tsabit Ibn al-Dhahak:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ بِالْمُؤْجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ (رواه مسلم)⁵⁸

Artinya:

“Bahwa Rasulullah Saw telah melarang bermuzara’ah dan memerintahkan sewa-menyewa saja dan Rasulullah Saw bersabda, itu tidak mengapa”.⁵⁹

Alasan tidak dibolehkannya akad *muzara’ah* dan *mukhabarah*

karena objeknya belum terlihat dan tidak jelas kadar dan ukurannya karena imbalannya berupa hasil pertanian yang belum ada, sehingga bagi hasil yang akan dibagikan belum jelas. Bahkan apabila terjadi gagal panen maka pekerja tidak akan mendapatkan hasil dari pekerjaannya. Akad

⁵⁶Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Juz 5 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), h. 19, hadis ke-4003.

⁵⁷Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Juz 5, h. 24, hadis ke-4037.

⁵⁸H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 157.

⁵⁹H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 157.

muzara'ah menjadi boleh menurut Abu Hanifah dan Zufar ketika hasil pertanian menjadi milik pemilik lahan, adapun hasil yang diterima pekerja berupa upah atas jasanya.

D. Konsep 'Urf

'Urf menurut bahasa merupakan sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara adat adalah sesuatu perbuatan yg berulang-ulang dikerjakan. Menurut istilah, 'urf adalah kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang baik dalam perkataan dan perbuatan.⁶⁰

Menurut Ahmad Azhar Basyir 'urf memiliki tiga syarat yaitu adanya kemantapan jiwa, sejalan dengan akal sehat dan dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Adapun hujjah 'urf sebagai dalil syara didasarkan kepada firman Allah swt pada QS. al-A'raf/17: 199 sebagai berikut:

حُذِرَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.⁶¹

Tidak semua 'urf dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Adapun syarat 'urf sebagai sumber hukum yang dikemukakan oleh para *ushuliyyun* sebagai berikut:

1. Kebiasaan tersebut harus berlaku secara umum.
2. 'urf yang telah berlaku dan berjalan sejak lama.
3. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.

⁶⁰Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, t.th.), h. 209. Dikutip dalam Mohammad Mufid. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2016), h. 151.

⁶¹Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kementrian Agama: Direktorat urusan Agama Islam, 2012), h. 49.

4. Tidak ada teks hukum dalam permasalahan tersebut.⁶²

Fuqaha dalam mazhab fikih sepakat menjadikan *'urf* secara umum sebagai dalil hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perbedaan pendapat diantara mereka terletak pada limitasi atau batasan dan lingkup aplikasi dari *'urf* itu sendiri. Mustafa Dib al-Bugha mengemukakan ketentuan *'urf* sebagai dalil hukum diantaranya sebagai berikut:

1. Setiap kebiasaan (*'urf*) masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasi secara positif sehingga menjadi hukum syara', maka ulama ushul sepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat secara syar'i dan menjadi hukum Islam.
2. Kebiasaan (*'urf*) masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dibatalkan secara eksplisit oleh syariat sehingga menjadi haram hukumnya, maka para ulama ushul sepakat bahwa kebiasaan tersebut harus dihindari oleh segenap umat Muslim (*'urffasid*).⁶³

Dalam kajian ushul fiqh *'urf* diklasifikasikan dalam berbagai aspek, berikut akan diuraikan setiap bagiannya:

1. *'Urf* ditinjau dari sisi kualitasnya:
 - a. *'Urf sahih* atau *al-'Adah Ashahihah* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Seperti memesan untuk dibuatkan pakaian kepada penjahit.
 - b. *'Urf fasid* atau *'urf* yang batal yaitu bertentangan dengan syari'ah. Seperti meminum minuman keras di saat merayakan pesta.⁶⁴
2. *'Urf* ditinjau dari ruang lingkup berlakunya:

⁶²Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fikihi al- Amm* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1978 M/1419 H), h. 873-881.

⁶³Mustafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha Fi al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus; Dar Imam al-Bukhari, t.th), h. 246. Dikutip dalam Mohammad Mufid. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2016), h. 158.

⁶⁴H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2005), h. 90.

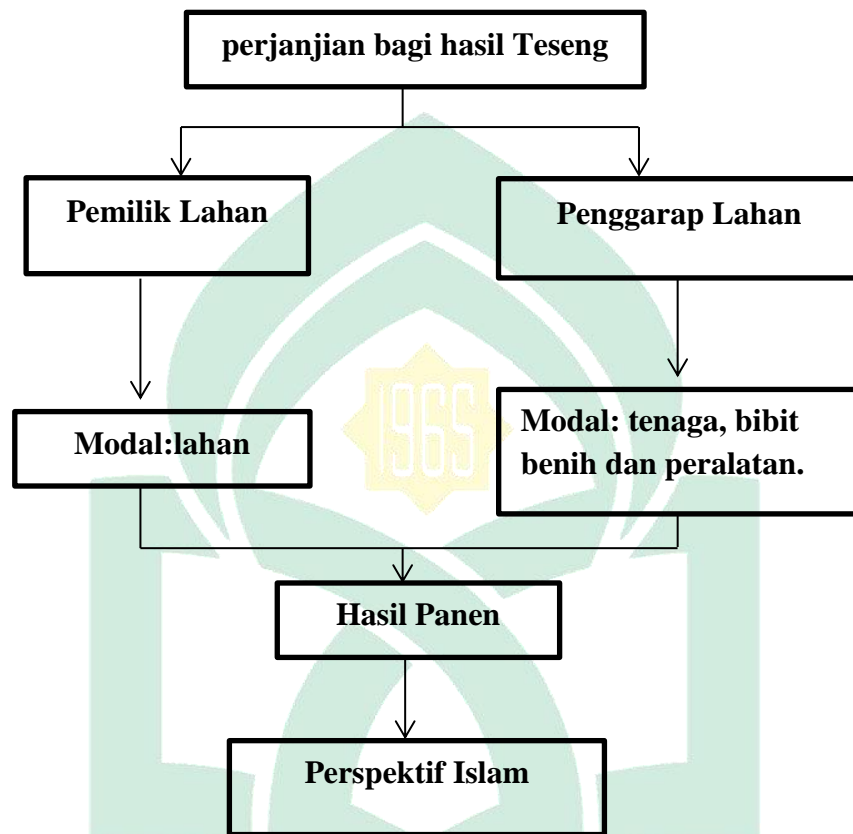
- a. *‘Urf ‘amm* atau *‘urf* yang bersifat umum yaitu adat yang berlaku untuk semua orang disemua negeri. Misalnya, membayar angkutan umum tanpa didahului dengan ijab kabul.
- b. *‘Urf khas*, atau *‘urf* yang khusus yaitu kebiasaan yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu dan masyarakat tertentu. Misalnya di suatu daerah boleh mengembalikan barang yang di beli karena adanya cacat terhadap barang tersebut, tetapi di daerah lain walaupun barang yang cacat tersebut sama, konsumen tidak bisa mengembalikan barang itu.⁶⁵

E. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran memiliki fungsi untuk mengungkapkan permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan proposal penelitian, maka peneliti menggunakan kerangka pemikiran berupa skema sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

⁶⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 217.

Gambar 2.1 *Kerangka Teoritis Penelitian*

Masyarakat Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep yang mayoritasnya bekerja sebagai petani, dimana antara pemilik lahan dan petani penggarap menjalin suatu kerjasama dengan akad bagi hasil yakni "*Teseng*" yang prakteknya masih berdasarkan adat setempat dimana pemilik modal hanya menyediakan lahan dan penggarap lahan yang menanggung semuanya baik bibit benih, tenaga dan peralatan. Dalam penelitian ini praktek akad *teseng* tersebut akan ditinjau dengan perspektif Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu cara atau teknik pengolahan data yang bersifat uraian, dengan penjelasan data yang ada sehingga terdapat sebuah hubungan yang jelas dan logis.⁶⁶ Dalam penelitian deskriptif, peneliti bertindak sebagai pengamat dan tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan serta memecahkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat.⁶⁷ Dimana hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan mengungkap fakta-fakta mengenai praktik bagi hasil “*Teseng*” dalam perspektif Islam.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan oleh peneliti karena isi dalam penelitian ini menelusuri teks-teks Al-qur'an dan hadis Nabi Saw mengenai bagi hasil dalam pertanian. Adapun Pendekatan sosiologis digunakan karena objek penelitian ini terkait dengan aspek kemasyarakatan baik individu maupun kelompok. Dalam penelitian sosial, Peneliti berkedudukan sebagai instrumen penelitian yang mengambil alih segala kegiatan mulai sebagai perencana sampai dengan pelaporan hasil yang berbaur langsung dalam kehidupan masyarakat guna mendapatkan data dan informasi yang akurat.

⁶⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 98.

⁶⁷Nurlina T. Muhyuddin dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Sosial* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017), h. 11.

C. *Sumber Data*

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, kesalahan yang dilakukan dalam menggunakan atau memahami sumber data itu dapat mempengaruhi data yang diperoleh. Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber utama dimana data tersebut dihasilkan. Dalam penelitian ini sumber utamanya adalah masyarakat petani yang bersangkutan (petani pengelola sawah), petani pemilik tanah (sawah), ataupun seluruh masyarakat yang berkependudukan di Desa Manggalung, Kec. Mandalle Kab. Pangkajene yang kegiatan perekonomiannya masuk dalam kategori petani padi dengan akad bagi hasil yakni *Teseng*.
2. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua. Misalnya, berupa data-data kependudukan yang terdapat di kantor desa, literatur-literatur atau bacaan baik media cetak maupun internet yang terkait serta mendukung penelitian ini.

D. *Metode Pengumpulan Data*

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mempermudah dalam mendapatkan fakta yang konkret di lapangan terdiri dari:

1. Metode Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi sebagai metode ilmiah bisa diartikan sebagai pengamatan yang sistematis baik secara langsung maupun tidak langsung dari fenomena-fenomena yang

diteliti.⁶⁸ Observasi dapat dilaksanakan dengan dua cara. pertama, partisipasi berarti peneliti ikut serta ke dalam kegiatan. Kedua, observasi Non partisipasi berarti peneliti hanya sebagai pengamat di luar kegiatan. Dalam penelitian ini digunakan metode observasi nonpartisipasi. Melalui metode ini peneliti mengamati dan mengungkapkan informasi yang ada dari sasaran/sumber data terkait dengan judul yang akan diteliti.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah satu cara pengumpulan data pencarian informasi langsung dari sumbernya.⁶⁹ Adapun bentuk-bentuk wawancara terbagi tiga, sebagai berikut:

a. Wawancara Sistematis

Wawancara sistematis yaitu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden sudah dipersiapkan dan disusun sedemikian rupa, pedoman tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti.

b. Wawancara Terarah

Wawancara terarah dilaksanakan secara bebas, tetapi tetap tidak keluar dari pokok permasalahan dari apa yang akan diteliti. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

c. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan secara informal yang mengharuskan pewawancara hidup bersama-sama dengan responden dalam waktu yang relatif lama. Metode ini tidak menggunakan pedoman wawancara, pertanyaannya

⁶⁸Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar maju, 1990), h. 187.

⁶⁹Sudaryono, *Metode penelitian* (Cet 2; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 212.

bersifat spontan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan pada saat melakukan wawancara bersama-sama responden.⁷⁰

Penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait diantaranya: petani penggarap sawah, petani pemilik tanah (sawah), dan masyarakat lainya yang informasinya dianggap penting dan relevan. Melalui metode ini informasi yang diungkap terkait bagi hasil “*Teseng*” yang di praktekkan dalam masyarakat Manggalung.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara dalam metodologi penelitian kualitatif. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang meliputi dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Pada intinya metode dokumentasi digunakan untuk menelusuri data historis.⁷¹ Dokumen dibagi menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan resmi sebagai berikut:

a. Dokumen Pribadi

Dokumen pribadi adalah catatan seseorang yang dituangkan dalam tulisan mengenai tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen ini dikumpulkan agar memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor yang terkait dengan subjek penelitian. Seperti buku harian, surat pribadi dan autobiografi.

b. Dokumen Resmi

Dokumen resmi terbagi atas dokumen inter dan ekstern. Dokumen intern yang berasal dari dalam lingkungan kantor dapat berupa laporan rapat, intruksi

⁷⁰H. M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2013), h. 134-137.

⁷¹H. M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, h. 153.

pengumuman, dll. Adapun dokumen ekstern berupa bahan informasi seperti majalah, pemberitahuan, berita-berita yang dipublikasikan, dll.⁷²

Dalam penelitian ini, digunakan dokumen-dokumen yang berasal dari Desa yang bersangkutan baik dokumen pribadi maupun resmi, guna memperoleh dan mencatat data yang diperlukan dalam penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan perlengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan suatu penelitian yang digunakan untuk membantu dalam pengumpulan data dan informasi yang akurat, sehingga pemilihan instrumen dapat mempengaruhi hasil dari penelitian yang dilakukan. Agar meningkatkan validitas hasil penelitian, diperlukan instrumen penelitian yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan. Berikut alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Daftar pertanyaan yang secara garis besar mencakup hal-hal terkait penelitian yang berfungsi sebagai pedoman wawancara.
2. *Handphone* digunakan untuk mengambil gambar sekaligus sebagai *tape recorder*. Dokumentasi yang dilakukan dapat membantu peneliti untuk mengingat dan merekam kejadian dalam bentuk gambar. Sedangkan dengan *tape recorder* fungsinya sebagai alat bantu interview agar peneliti mengingat apa yang harus didengarkan pada saat melakukan pengumpulan informasi.⁷³

⁷²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017), h. 217-219.

⁷³H. M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 122.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari berbagai hasil pengumpulan data, maka peneliti mengadakan analisa data yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibahas dan di interpretasikan.⁷⁴ Data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya dianalisis ke tahap berikutnya. Adapun cara analisis data kualitatif yang dilakukan oleh Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi data, merujuk pada pemilihan, penyederhanaan dan pentransformasian “data mentah” yang dikumpulkan di lapangan. Selanjutnya dilakukan analisis dengan merangkum, dibuatkan tema, dibuatkan kode dari potongan-potongan data agar di hilangkan yang dianggap tidak perlu, melakukan seleksi yang ketat dengan fokus pada hal-hal pokok dan menyusun data sehingga tersusun secara sistematis agar mudah dipahami hingga laporan akhir lengkap.
2. Model Data (*Data Display*), model diartikan sebagai suatu kumpulan informasi yang kompleks yang dapat membantu peneliti dalam pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya. Secara umum, penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teks naratif. Teks naratif merupakan uraian singkat yang didalamnya terdapat pola-pola yang sudah disederhanakan.
3. Verifikasi kesimpulan, yaitu teknik analisis yang dilakukan peneliti dengan mencari makna yang muncul dari data yang teruji kepercayaan, kekuatan dan validitasnya lalu melakukan penarikan kesimpulan yang jelas.⁷⁵

⁷⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2001), h. 287.

⁷⁵Emzir, *Metodologi Penelitian Analisis Data* (Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 129-133.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Struktur Organisasi Desa Manggalung

Desa manggalung memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

“Mewujudkan Desa Swasembada, Sejahterah, aman, dan damai bagi seluruh masyarakat Desa dengan Integritas dan Solidaritas”

b. Misi

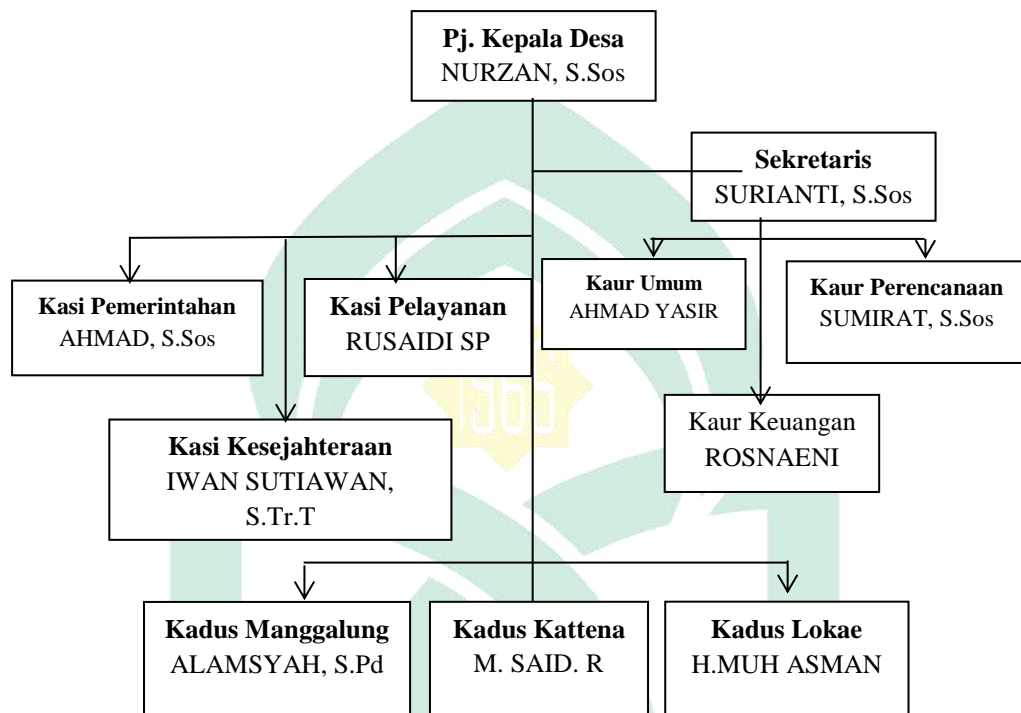
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa ke suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa. Untuk mewujudkan visi desa tersebut diatas, maka pemerintah Desa Manggalung menetapkan Misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat yang efisien, demokratis, adil dan merata.
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi disektor pertanian, perdagangan dan jasa.
- 3) Mendorong kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah.
- 4) Meningkatkan kegiatan pembinaan keagamaan, budaya dan olahraga.
- 5) Meningkatkan kehidupan masyarakat yang semakin layak, adil dan merata.
- 6) Memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana umum.⁷⁶

c. Struktur Organisasi Pemerintahan

⁷⁶*Profil Desa*, Desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kab. Pangkajene Dan Kepulauan periode Tahun 2019 Belum Perbaharuan.

Gambar. 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Manggalung



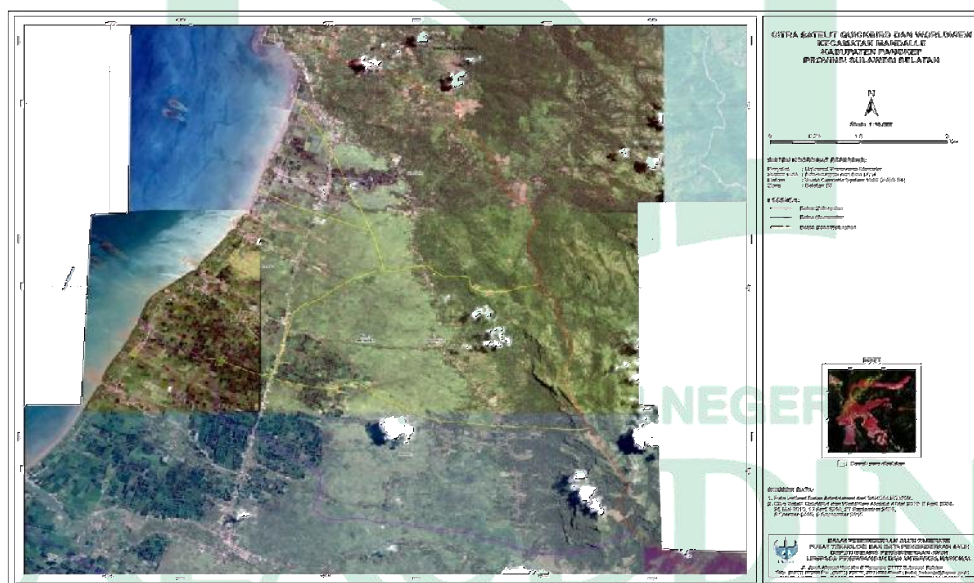
Sumber: Profil diolah dari Kantor Desa Manggalung

2. Sejarah Desa

Pada zaman dahulu di bagian timur kekaraengan Mandalle terdapat satu perkampungan yang cukup subur tanah pertaniannya yang bisa di tanami berbagai macam tanaman pertanian. Kehidupan masyarakat cukup makmur karna penghasilan pertanian melimpah seperti lahan persawahan dan perkebunan yang cukup produktif karena di tunjang daerah aliran irigasi *ulu salo*. Dengan air yang melimpah itulah yang di jadikan masyarakat sumber irigasi sampai meluap ke berbagai daerah sekitarnya sehingga masyarakat bergotong royong membuat bendungan (*Teppo*) pada saat itulah masyarakat menyebut perkampungan itu dengan nama *Toppoe* pada pertengahan tahun 1925.

Awal kemerdekaan dengan kondisi kehidupan masyarakat yang sudah semakin membaik di semua sektor seperti pertanian, peternakan, perkebunan dan meningkatnya penghasilan masyarakat. Masyarakat sudah mulai bekerja secara berkelompok dan saat itulah musyawarah pertama diadakan dan saat itu juga di sepakati untuk mengganti nama *Teppoe* menjadi Manggalung yang di ambil dari kata dasar *galung* (sawah). Pada tahun 1993 diusulkan Desa Manggalung untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa, yaitu Desa Manggalung Induk dan Desa Boddie. Resminya Desa Manggalung Pada Tahun 1994.⁷⁷

Gambar 4.2
Peta Desa Manggalung



Sumber: Profil diolah dari Kantor Desa Manggalung

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Mangalung dapat dilihat pada tabel berikut:

⁷⁷Profil Desa, Desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kab. Pangkajene Dan Kepulauan periode Tahun 2019 Belum Perbaharuan.

Tabel 4.1

Tabel Sarana dan Prasarana Desa Manggalung

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor Desa	1	Baik
2.	Gedung SLTP/MTS	1	Baik
3.	Gedung SD	2	Baik
4.	Gedung TK/PAUD	1	Baik
5.	Masjid	5	Baik
6.	Poskesdes	1	Baik
7.	Posyandu	3	Baik
8.	Poskamling	4	Baik
9.	Jembatan	11	Baik
10.	Gedung Pertemuan	1	Perlu Perbaikan
11.	Jalan Tani	6	Perlu Perbaikan
12.	Jalan Lorong desa	10	Sangat Perlu Perbaikan

Sumber: Profil diolah dari Kantor Desa Manggalung

3. Kondisi Geografis

Secara umum Desa Manggalung adalah daerah dataran rendah dengan hamparan sawah yang luas yang berada di kaki pegunungan, dengan ketinggian di atas permukaan laut 105 Mdpl. Desa Manggalung mempunyai luas wilayah seluas kurang lebih 7,8 Km² / 780 Ha dan memiliki 3 dusun yakni Manggalung, Lokae dan Kattena. Adapun batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Utara : Desa Coppo Tompong
- b. Selatan : Desa Benteng

- c. Barat : Desa Boddie
- d. Timur : Kabupaten Barru

Untuk mengetahui lebih Jelasnya mengenai kondisi geografis Desa Manggalung diatas, dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4.2

Kondisi Geografis Desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, 2019.

No	Uraian	Ket
1	Luas wilayah : 7,8 Km ² / 780 Ha	
2	JumlahDusun : 3 (Tiga) 1) Dusun Manggalung 2) Dusun Lokae 3) Dusun Kattena	
3	Batas wilayah : a. Utara : Desa Coppo Tompong b. Selatan : Desa Benteng c. Barat : Desa Boddie d. Timur : Kabupaten Barru	
4	Topografi a. Secara umum Desa Manggalung adalah daerah dataran rendah dengan hamparan sawah yang luas yang berada pada kaki pegunungan. b. Ketinggian di atas permukaan laut 105 Mdpl	
5	Hidrologi : Drainase, Irigasi Ulusalo, dan Tadah Hujan	

6	Klimatologi : a. Suhu 24 – 31 °C b. Curah Hujan 2.500-3.000 mm/tahun c. Kelembaban udara d. Kecepatan angina	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber: Profil diolah dari Kantor Desa Manggalung

4. Kondisi Demografis

a. Keadaan Penduduk dan Tingkat Pendidikan

Adapun jumlah penduduk Desa Manggalung 2.458 Jiwa pada tahun 2019, dengan jumlah kepala keluarga terdapat 747 KK, yang terdiri dari 1.200 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan 1.258 orang perempuan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penduduk desa Manggalung di dominasi oleh perempuan dibandingkan laki-laki.

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat suatu bangsa, karena dengan pendidikan seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat mengantarkan seseorang ke jalan yang lebih baik. Zaman terus berganti, dimana sekarang merupakan era modern yang menggunakan mesin dan teknologi yang canggih sebagai penunjang dalam kehidupan masyarakat, tanpa ilmu pengetahuan tentu manusia tidak akan mampu mengoperasikannya dan dampak yang lebih buruk yang akan terjadi jika manusia tidak mampu mengimbangi perkembangan zaman yang terjadi yaitu tenaga manusia akan digantikan oleh mesin jika tidak mampu bersaing.

Dalam upaya memenuhi asupan pendidikan dalam masyarakat, Desa Manggalung memiliki fasilitas berupa Satu gedung SLTP, dua gedung SD dan satu gedung TK/PAUD. Mayoritas masyarakat Mangalung sadar akan pentingnya suatu pendidikan, hal itu terlihat dari frekuensi terbanyak berada pada tingkat pendidikan SLTP dan SLTA dimana tingkat SLTP sebanyak 900 orang dan SLTA

720 orang, jumlah itu lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak bersekolah sebanyak 479 orang.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Manggalung termasuk kedalam golongan menengah ke atas, dimana masyarakat yang termasuk golongan miskin hanya 15%, mayoritas masyarakatnya berada pada kategori KK sedang sebanyak 50%, KK berada pada golongan kaya sebesar 5% dan selebihnya termasuk KK sejahtera dan pra sejahtera.

b. Keadaan Sosial Budaya dan Keagamaan

Kebudayaan pada hakekatnya meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik material maupun spiritual. Oleh karena itu, kebudayaan ditempatkan sebagai sistem aturan atau pola kelakuan yang bersumber pada sistem kepercayaan sehingga pada hakekatnya sistem kepercayaan sama dengan kebudayaan.

Masyarakat Manggalung sangat kental dengan adat kebudayaan yang berbasis Islami, terlihat dari beragam kegiatan yang dilakukan masyarakat seperti perayaan maulid dan *isra' mi'raj*, pelaksanaan barazanji pada saat melakukan hajatan seperti pernikahan, akikah, naik rumah baru dan lain-lain. Pada saat bulan suci ramadhan masyarakat Muslim di Manggalung beramai-ramai melaksanakan shalat tarawih berjamaah di Masjid, berpuasa dan melakukan buka puasa bersama.

Dari segi kepercayaan masyarakat Manggalung menganut dua agama yaitu agama Islam dan Kristen. Tetapi mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan hanya terdapat dua penduduk saja yang beragama Kristen yang bertempat tinggal di dusun Lokae. Walaupun terdapat penduduk yang berbeda Agama ditengah masyarakat tetapi masyarakat Manggalung dapat hidup rukun dan saling menghargai satu sama lain.

Adapun Kalkulasi dari keadaan demografis yang dipaparkan sebelumnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Kondisi Demografis Desa Manggalung Kecamatan Mandalle
Kabupaten Pangkep, 2019.

No	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Kependudukan a) Jumlah Penduduk b) Jumlah KK c) Jumlah Laki-Laki d) Jumlah Perempuan	2.458 Jiwa 747 KK 1.200 Jiwa 1.258 Jiwa	
2	Kesejahteraan Sosial a) Jumlah KK Prasejahtera b) Jumlah KK Sejahtera c) Jumlah KK Kaya d) Jumlah KK Sedang e) Jumlah KK Miskin	10% 20% 5% 50% 15%	
3	Tingkat Pendidikan a) Tidak Sekolah b) SD c) SLTP d) SLTA e) Diploma I/II/III f) Diploma IV/ Stara I g) Strata II h) Strata III	479 Orang 240 Orang 900 Orang 720 Orang 26 Orang 88 Orang 5 Orang 0 Orang	
5	Agama a) Islam b) Kristen	2.456 Orang 2 Orang	

Sumber: Profil diolah dari Kantor Desa Manggalung

5. Keadaan Ekonomi dan Potensi Desa

Desa Manggalung mengandalkan sektor pertanian, perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan peternakan sebagai tulang punggung ekonomi desa yang terdiri dari lahan persawahan, tanah kering, tanah perkebunan dengan komoditi kakao, padi, dan hewan ternak sebagai komoditi terbesar. Selain itu juga dibudidayakan tanaman pangan seperti jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar serta tanaman buah-buahan berupa mangga dan pisang. Tanaman perkebunan selain kakao antara lain Jambu mente, mahoni dan Jati serta gula merah. Dua komoditi terakhir ini merupakan komoditi khas yang umumnya potensial dikembangkan dipengunungan.

Potensi ekonomi desa yang lain adalah peternakan, meliputi beragam jenis ternak, antara lain (diurut berdasarkan jumlah populasinya):

- a. Sapi
- b. Ayam (Ayam kampung / ayam negeri)
- c. Bebek petelur
- d. Kuda
- e. Kambing
- f. Itik dan angsa

Pengelolaan potensi kehutanan, pertanian, perkebunan serta peternakan hanya dilakukan dalam skala terbatas atau dalam skala rumah tangga. Tidak ada investasi besar dalam pengelolaan tersebut sehingga produktivitasnya juga terbatas. Potensi perikanan juga sebenarnya dapat dikembangkan sehubungan tersedianya media budidaya ikan Tambak Budidaya, kolam, waduk, dan sumber-sumber air tetapi potensi tersebut belum terlalu berkembang.

Mengingat letaknya yang memiliki sungai, yaitu sungai *Ulu salo* menjadikan sungai tersebut juga memberikan kekayaan sumber daya alam berupa air pengairan persawahan dan pertanian serta bahan galian pasir dan batu sungai. Namun demikian banyak ruas jalan desa maupun jalan dusun yang mengalami kerusakan yang selama beberapa tahun belum diperbaiki. Bahkan beberapa jalan tani mengalami yang semula dirintis belum juga mengalami peningkatan, baik dikeraskan dengan pasir dan batu (sirtu) ataupun diaspal. Sejauh ini jalan tani semakin menjadi kebutuhan pula dalam hal pengembangan jaringan jalan guna semakin mempermudah petani mengangkut hasil pertanian mereka.

Kegiatan pertanian juga sangat bergantung pada keberadaan irigasi dimana Desa Manggalung memiliki beberapa saluran irigasi dan drainase yang masih harus di perbaiki dan di tambah. Mengingat banyaknya potensi air yang dapat digunakan maka saat ini pembangunan waduk dan kolam maupun sarana penggunaan air lainnya seperti perpipaan air bersih masih perlu dilakukan. Saluran irigasi yang saat ini pun memerlukan pemeliharaan dimana Pemerintah desa perlu mendorong warga untuk melakukannya secara partisipatif.⁷⁸

Ditunjang dengan sumber daya alam yang tersedia di dalam desa, sumber daya tersebut sebagai wadah bagi masyarakatnya untuk mencari sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun mata pencaharian masyarakat Manggalung diantaranya petani, peternak, pedagang, PNS, dan wiraswasta.

⁷⁸*Profil Desa*, Desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kab. Pangkajene Dan Kepulauan periode Tahun 2019 Belum Perbaharuan.

Tabel 4.4

Profesi Masyarakat Manggalung

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	290 Orang
2.	Peternak	26 Orang
3.	Pedagang	15 Orang
4.	PNS	55 Orang
5.	Wiraswasta	268 Orang

Sumber: Profil diolah dari Kantor Desa Manggalung

B. Jenis-Jenis Kerjasama Lahan Pertanian pada Masyarakat Manggalung

Desa Manggalung merupakan desa yang terletak di kaki gunung yang memiliki wilayah perkebunan dan area persawahan yang luas sehingga desa ini memiliki potensi dalam bidang pertanian terutama dalam pertanian padi. Hal tersebut menjadi faktor utama yang menjadikan pekerjaan bertani banyak digeluti mayoritas masyarakatnya dan menjadikannya sebagai sumber penghidupan secara turun temurun.

Masyarakat Manggalung masih kental dengan rasa kekerabatan dan solidaritas yang tinggi. Gotong royong dalam masyarakat sangat dijunjung tinggi, begitupun dalam bidang pertanian mereka saling bekerja sama baik antara pemilik lahan, petani penggarap dan pihak lainnya yang terkait.

1. Macam-Macam Bentuk Kerjasama Pertanian Pada Masyarakat Manggalung

Menurut bapak Baharuddin ada beberapa bentuk kerjasama lahan pertanian yang sering dilakukan masyarakat Manggalung, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sistem *Paje'*, merupakan sistem bagi hasil dimana pemilik lahan menyewakan lahannya kepada pekerja untuk dikelola dengan jangka waktu tertentu dan sewa dibayar pada awal perjanjian. Hasil panen dari lahan yang dikelola menjadi hak sepenuhnya pekerja dan tidak dibagi keuntungan antara pemilik dan pekerja sampai dengan waktu perjanjian berakhir. Adapun luas lahan yang dikelola pekerja harus sesuai dengan nominal yang diberikan kepada pemilik lahan hal ini biasa disepakati lebih dahulu antara kedua belah pihak sebelum terjadi akad. Sistem ini biasa dilakukan dengan alasan pemilik lahan sangat membutuhkan uang sehingga lahannya ia sewakan kepada pekerja. Sistem ini mayoritas dilakukan pada kerja sama empang sehingga di Manggalung sangat jarang masyarakatnya menggunakan sistem ini karena objek dari kerjasama mereka yaitu sawah bukan empang.
- b. *Balango*, merupakan sistem bagi hasil dimana pemilik menggadaikan lahannya kepada pekerja atau mengambil uang dari pekerja dengan menjaminkan lahannya untuk dikelola, pekerja berhak sepenuhnya untuk mengolah lahan tersebut dengan hasil panen dibagi dua antara kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu. Setelah kerja sama berakhir, lahan pertanian menjadi hak sepenuhnya pemilik sawah dengan mengembalikan sejumlah uang yang dia terima dari pekerja pada awal perjanjian. Hal yang sama di utarakan oleh bapak H. Mustari sebagai berikut:

“Ada juga bentuk bagi hasil gadai, sistem ini terjadi dengan penyerahan modal kepada pemilik lahan baik berupa harta benda maupun uang tunai supaya pekerja dapat mengelola lahannya. Sistem ini biasanya menghadirkan saksi dan aparat desa setempat karena ada modal yang dikeluarkan sebagai penguatan hukum dari perjanjian ini.”⁷⁹

⁷⁹H. Mustari, *Pemilik Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 29 Juni 2020, 16:20.

- c. *Teseng*, merupakan kerja sama bagi hasil dimana pemilik lahan hanya menyediakan lahan/sawahnya dikelola oleh penggarap, dimana segala kebutuhan pengelolaan lahan tersebut baik benih, racun, pupuk semuanya ditanggung oleh penggarap sawah. Sistem ini mayoritas digunakan oleh masyarakat petani padi di Manggalung.⁸⁰

2. Masa Panen Padi Pada Masyarakat Manggalung

Kerjasama di Manggalung berlangsung dengan setahun dua kali panen yang dikenal dengan istilah *galung Bare'* dan *galung Timo'*.

a. *Galung Bare'*

Galung Bare' dari Bahasa bugis yang terdiri dari dua kata yaitu *galung* dan *Bare'*, “*galung*” berarti sawah dan “*bare*” berarti musim hujan. Menurut istilah *galung Bare'* merupakan proses menanam padi saat musim curah hujan. Menurut H. Jannah, Rasio pembagian hasil panen pada musim ini yang sudah menjadi adat kebiasaan dan sudah menjadi aturan ditengah-tengah masyarakat setempat adalah bagi dua dari hasil panen yang didapat, $\frac{1}{2}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{1}{2}$ untuk petani penggarap.⁸¹ Berikut tabel macam-macam bibit benih yang digunakan masyarakat Manggalung pada musim hujan:

Tabel 4.5

Jenis Bibit/benih yang digunakan pada Musim Hujan

No	Nama Bibit/Benih	Harga RP/Kg	Kelebihan	Kekurangan
1	Impari 32	65000/5	Gabah lebih banyak karena Memiliki banyak	Tidak tahan panas dan warna beras yang dihasilkan

⁸⁰Baharuddin, *Pekerja Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 01 Juli 2020. 18:15.

⁸¹H. Jannah, *Pemilik Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 29 Juni 2020, 14:10.

			tangkai padi	agak buram.
2	Impari 42	65000/5	Batang padi kokoh.	Kualitas beras tidak bagus jika dijual harganya murah
3	Mikongga	65000/5	Beras yang dihasilkan berwarna putih.	Gabah yang dihasilkan kurang berisi.
4	Ciliung	65000/5	Kualitas beras bagus dan berwarna jernih.	Tidak tahan panas dan air yang berlebih.

Sumber: Hasil wawancara olahan peneliti

b. *Galung Timo'*

Menurut bapak Munir, *Galung Timo'* merupakan penanaman padi disaat musim kemarau dengan mengandalkan pengairan irigasi atau dari curah hujan yang ada di penghujung musim hujan, dimana setelah panen *Galung Bare'* masyarakat segera mempersiapkan sawahnya kembali untuk ditanami padi *ase Timo'* (bibit padi untuk musim kemarau).⁸²

Menurut bapak Kama', *Galung Timo'* baru dilakukan masyarakat Manggalung pada tahun 2008, awalnya mereka hanya menanam tanaman kacang di sawah saat musim kemarau. Kemudian penanaman kacang berhasil, lalu mereka berinisiatif untuk menanam bibit padi dengan harapan berhasil seperti penanaman tanaman kacang yang mereka lakukan sebelumnya dan mereka mendapat hasil yang tidak mengecewakan. Tetapi *galung Timo'* ini memiliki resiko gagal panen yang tinggi dan beberapa kali masyarakat mengalami gagal panen di musim kemarau.⁸³

Tidak semua sawah dapat diperuntukkan untuk dikelola pada musim kemarau, hanya sawah yang berada di dataran rendah yang dapat di kelola karena

⁸²Munir, *Pemilik Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 29 Juni 2020, 15:00.

⁸³Kama', *Pekerja Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 01 Juli 2020, 17:05.

memiliki kendala dengan pengairan sawah. Sawah yang berada didataran tinggi memiliki tanah yang cenderung cepat mengering dan keras sehingga susah untuk di kelola pada musim kemarau yang notabennya sangat jarang turun air hujan. Rasio bagi hasil pada saat musim kemarau berbeda dengan musim hujan, karena *galung Timo'* memiliki risiko gagal panen yang tinggi sehingga pembagian hasil panen pada musim ini, menggunakan rasio 1/3 untuk pemilik dan 2/3 untuk penggarap lahan. Berikut macam- macam bibit yang digunakan masyarakat Manggalung ketika musim kemarau:

Tabel 4.6

Jenis Bibit/benih yang digunakan pada Musim Kemarau

No	Nama Bibit/Benih	Harga RP/Kg	Kelebihan	Kekurangan
1	Ciligus	65000/5	Tahan panas, Gabah bagus dan memiliki timbangan yang berat	Tidak tahan pada musim hujan.
2	Ceherang	65000/5	Beras putih, gabah memiliki timbangan yang berat.	Mudah terserang hama <i>gresek daun</i> (daun hangus)
3	Mikongga	65000/5	Beras yang dihasilkan berwarna putih.	Batang padi mudah patah leher yang menggantung.

Sumber: Hasil wawancara olahan peneliti.

C. Praktik Bagi Hasil *Teseng* di Manggalung

Dari berbagai bentuk kerjasama lahan pertanian yang dipaparkan sebelumnya, bentuk kerjasama pertanian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah kerja sama dengan sistem bagi hasil *teseng*.

Dimana mayoritas masyarakat Manggalung menggunakan sistem *teseng* untuk bagi hasil dari kerja sama pertanian padi. Untuk lebih jelasnya, praktik *teseng* dapat diuraikan dibawah ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Bagi Hasil *Teseng* di Manggalung

Sistem bagi hasil dilakukan sudah sejak dahulu kala, zaman dimana nenek-nenek kita masih menumbuk padi untuk menghasilkan beras. Tetapi dulu hanya pembagian $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ (bagi dua), setelah berjalannya waktu disaat keadaan cuaca dimusim kemarau memungkinkan untuk melakukan penanaman padi, masyarakat mulai mengerjakan kerja sama pertanian yang dilakukan dengan pembagian $\frac{1}{3} : \frac{2}{3}$ (bagi tiga).⁸⁴ Faktor yang mendorong terjadinya bagi hasil ini baik dari pihak penggarap dan pemilik lahan memiliki alasan dan tujuan yang sama, yaitu mereka saling membutuhkan dan atas dasar saling tolong menolong. Berikut ini, diuraikan penyebab terjadinya bagi hasil *teseng* di Manggalung:

- a. Mayoritas masyarakat Manggalung menggantungkan hidup sebagai petani padi, dimana tingkat kesejahteraan mereka berbeda-beda.
- b. Pemilik lahan sudah tidak mampu lagi mengelola lahannya sendiri dikarenakan usia yang sudah tua dan tidak memiliki anak untuk melanjutkan profesinya. walaupun memiliki anak tetapi kebanyakan pemuda di Manggalung memilih untuk merantau untuk mengangkat derajat keluarga dibandingkan tinggal di kampung menjadi seorang petani. Berdasarkan keterangan dari ibu Saturi, ia mengatakan:

⁸⁴ Iskandar, *Pemilik Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, 02 Juli 2020, 16:10.

“engka galung de’na iyullei jama-jamai nasaba matoani, deto gaga anak wedding isuro nasaba lao manengngi sompe ku iriang, jadi yappattesengngni sibawa taue iya naulle jamangengki”.⁸⁵

- c. Penggarap lahan/buruh tani tidak memiliki lahan yang cukup untuk dikelola. Walaupun mayoritas masyarakat Mangalung memiliki sawah sendiri, tetapi ada petani yang memiliki lahan tidak cukup luas sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tentu penggarap memerlukan lahan tambahan untuk dikelola. Sebaliknya, ada pemilik lahan yang memiliki beberapa lahan pertanian dan ia tidak mampu mengelolanya sendiri sehingga membutuhkan seseorang untuk menggarapnya. Tetapi biasanya sistem *teseng* terjadi atas inisiatif pemilik lahan yang menawarkan lahannya dikelola kepada penggarap yang ia percayai. Bapak Amboe mengatakan:

“naolliki taue ya maega-ega lahanna untuk jamangengngi galunna. mattesengna sibawa punnana galung, wassele’na akko jajiwi ibage dua sibawa punnana galung. nasaba makurang to lahan rialeku untuk ujama jadi wettukku nawereng galung untuk ujama, utarimani iyaro wettue”.⁸⁶

- d. Menurut bapak Syamsir yang bekerja sebagai pemadam kebakaran, biasanya pemilik lahan bekerja dibidang lain bukan seorang petani, ia memiliki sawah hanya untuk tambahan penghasilan semata dan tidak memiliki keahlian untuk mengelola lahannya sendiri sehingga membutuhkan seseorang yang dapat mengelola lahannya yakni penggarap lahan.⁸⁷

Secara umum, inisiatif untuk melakukan kerja sama *teseng*, kebanyakan dari pemilik lahan dengan berbagai alasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Sistem kekerabatan masih kental dimana biasanya pemilik lahan mempercayakan lahannya dikelola oleh kerabat dekatnya

⁸⁵ Satri, *Pemilik Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 03 Juli 2020, 18:40.

⁸⁶ Amboe, *Pekerja Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 01 Juli 2020, 16:12.

⁸⁷ Syamsir, *Pemilik Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 04 Juli 2020, 18:25.

atau pihak lain yang ia percayai. Sangat jarang penggarap sawah menawarkan diri untuk mengelola lahan pemilik sawah, apabila ia menawarkan diri tentu hanya kepada pemilik lahan yang ia sudah kenal dekat, atau memiliki hubungan kekerabatan.

2. Akad bagi hasil *Teseng*

Sebelum melaksanakan kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap, tentunya ada syarat dan prasyarat yang tertuang dalam suatu perjanjian. Menurut hasil wawancara, dalam praktik *teseng* di Manggalung akad yang dilakukan masih dilakukan secara tradisional sesuai dengan adat setempat, yaitu secara lisan dan tanpa menghadirkan pihak lain untuk menjadi saksi. Hal itu dikarenakan tidak ada resiko yang berarti, lain halnya jika menggunakan sistem *balango* atau *paje* yang mengeluarkan modal sehingga menggunakan saksi dan penyuratan kepada aparat desa sebagai penguatan hukum jika terjadi masalah kedepannya seperti modal yang sudah di ambil tidak dikembalikan oleh salah satu pihak. Seperti yang dikatakan oleh bapak Surullah:

“Degaga yaseng makkeda yangollikeng saksi narekko elokki sipatarimai galung untuk mabbage teseng, simata mateppe bawang. Nasaba demagaga modala ipessukengngi, denapada mabbage balango engka modala yappakatennengeng sehingga untuk jaga-jaga engka masala barang esso are’ga denapalisu modalae puru ikeluarkang, engkamma saksi sibawa aparat desa wedding sabbingiki”.⁸⁸

Masyarakat yang berprofesi sebagai Petani melakukan perjanjian kerjasama hanya berdasarkan kepercayaan dan tanpa melibatkan pihak lain atau aparat desa yang secara langsung ditunjuk sebagai saksi atas perjanjian yang mereka lakukan. Walaupun misalnya akad perjanjian yang

⁸⁸Surullah, *Pekerja Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 01 Juli 2020, 10:23.

dilakukan secara tidak langsung disaksikan oleh anggota keluarga lainnya.

Hal yang sama diutarakan oleh bapak Kamarudding:

*“wettunna mapattarima galungka, engkama keluarga laingnge tudang sibawa maccarita engka toni pajjama galungnge iya elo iwereng galung untuk iteseng, tapi de'to ipannesai makkeda jaji saksi yero keluargae apa demettomma biasa idi kumaihe mappatudang saksi”.*⁸⁹

Dalam fiqh Islam akad yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis harus memiliki saksi sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah:282. Mayoritas masyarakat Manggalung masih belum mengetahui bagaimana pelaksanaan akad yang sesuai dengan hukum Islam. Walaupun mereka tanpa sadar sudah melaksanakan kerja sama sesuai syariat Islam.

Berdasarkan yang dikatakan oleh bapak Tombong bahwa Pelaku Akad *teseng* biasanya bertemu secara langsung dan melakukan perjanjian antara kedua belah pihak, bapak Tombong mengatakan:

*“umpama makkedani punnana galung tajama sai iyaro galungnge, makkedani idi pajjamae bah, ipannessani bage siaga? akko galung timo abiasatta bage tellu, akko galung bare bage dua. Nappani ipannessa toni makkeda niga misseng pupu'e sibawa saro tassie sini-sinianna ipannessamaneng sibawa punnana galung. Idi maneng pajjamae tanggungngi, iya punnana galung sima'nami galungnge tette nawaja. Nappani sitarimangni tauwe, makkummiro. Narekko mabbicara wettu gangkanna ijama galungnge, sangngadi elo'pi nala punnana galunge nayulle tompa idi pajjamae jama-jamai galungnge”.*⁹⁰

Isi perjanjian dari beberapa wawancara di atas dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Menentukan pembagian hasil panen. Secara umum petani padi di Manggalung menggunakan rasio perbandingan $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$. untuk bagi hasil *ase*

⁸⁹Kamaruddin, *Pemilik Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 01 Juli 2020, 20:55.

⁹⁰Tombong, *Pekerja Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, 04 Juli 2020, 19:40.

Bare' dan untuk *ase Timo'* bagi hasilnya dibagi tiga dengan rasio perbandingan 1/3 : 2/3. Contohnya seperti yang dikatakan oleh bapak Firman:

*“Umpama lise'na galungge iya itesengnge engka 18 karung, rekko Bare'i ibage dua, punnana galung (mappateseng) runtun 9 karung iya majjamae (matteseng) 9 karung tomma naruntu. Rekko Timo', narekko 3 karung gabah iruntu, messui seddi. 2 tawana pajjamae sibawa 1 karung punnana galunge”.*⁹¹

Contoh pembagian hasil dengan sistem *teseng* dari wawancara diatas dapat dipahami sebagai berikut; apabila gabah yang dihasilkan di musim hujan sebanyak 18 karung gabah bersih maka 9 karung gabah untuk pemilik sisanya untuk pekerja. Jika di musim kemarau, apabila hasil panen gabah itu 3 karung gabah maka 2 untuk pekerja dan 1 untuk pemilik.

Menurut bapak Bahtiar, ada sebagian masyarakat memakai rasio perbandingan 1/4 (bagi empat) pada saat musim kemarau, dengan alasan sawah jauh dari sistem irigasi sehingga hanya mengandalkan tadah hujan dan hal ini sangat beresiko terjadi gagal panen.⁹²

- b. Penanggungan bibit, racun, pupuk, peralatan, ditanggung oleh pekerja dan pajak sawah tetap ditanggung oleh pemilik.
- c. Biaya pengangkutan apabila sudah panen dan dilakukan bagi hasil yang dikenal dengan *saro tassi* (gabah yang di angkut oleh motor *tassi*) atau *saro Teke'* (gabah yang diangkut dengan kuda) ditanggung masing-masing pihak yang berakad.
- d. Adapun lamanya waktu perjanjian tidak ditentukan, perjanjian berlangsung selama pemilik dan penggarap lahan memiliki kecocokan satu sama lain.

⁹¹Firman, *Pekerja Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 29 Juni 2020, 17:05.

⁹²Bahtiar, *Pemilik Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 06 Juli 2020, 16:15.

Masalah yang ditimbulkan dari bagi hasil *teseng* ini sangat jarang terjadi, karena mayoritas penggarap lahan melaksanakan tanggung jawabnya dengan amanah, apabila ia tidak amanah atau melakukan kecurangan tentu tidak akan ada lagi pemilik lahan yang akan memberinya lahan untuk dikelola dan akan berakhir dengan merugikan dirinya sendiri. Adapun pemilik lahan juga memberikan hak sepenuhnya kepada penggarap untuk mengelola lahannya, pemilik hanya menunggu bagi hasil dari *teseng* tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil *teseng* masih sesuai dengan adat setempat. Dalam pelaksanaan perjanjian, masyarakat melaksanakan akad secara lisan dan tidak menghadirkan pihak lain sebagai saksi, mereka hanya mengandalkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Adapun rasio pembagian hasil panen sudah jelas tergantung musim penanaman padi.

3. Proses dan Biaya Pengelolaan Sawah

a. Penggarapan Tanah

Sebelum penanaman padi dilakukan, petani pekerja terlebih dahulu membajak sawah agar siap untuk ditanami bibit padi. Pada zaman dahulu, pembajakan tanah dilakukan hanya menggunakan cara manual dengan menggunakan hewan ternak seperti kuda atau kerbau dan cara seperti itu membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup ekstra. Setelah perkembangan teknologi yang pesat, para petani kemudian beralih dari manual ke modern dengan menggunakan mesin yaitu traktor roda dua yang lebih efisien. Menurut bapak Baharuddin, Bagi petani yang tidak memiliki peralatan seperti traktor tentu melakukan Penyewaan traktor pada pihak lain yang memiliki traktor roda dua. Di Manggalung penyewaan traktor seharga Rp. 15.000/are. Jika sawah yang dikelola

b. Proses Pembenuhan dan penanaman bibit padi

Setelah pembajakan sawah dilakukan, proses selanjutnya adalah mempersiapkan benih padi yang dijadikan bibit untuk di tanam. Proses pembenihan dilakukan oleh petani pekerja, dimana pertama-tama benih yang telah dipilih direndam terlebih dahulu selama dua malam, kemudian benih di bilas sampai bersih lalu dilakukan pembungkusan selama dua malam kembali agar benih mulai berkecambah. Selanjutnya benih kemudian di taburkan kedalam sawah yang sudah dipersiapkan khusus untuk bibit padi yang disebut dengan “*abbineng*”. menurut bapak Usman, Setelah benih berumur satu minggu maka dilakukan pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk sebanyak 30 liter yang terdiri dari campuran 10 liter pupuk urea, 10 liter pupuk Z.A dan 10 liter pupuk poska. Dua minggu kedepan bibit kembali di pupuk dengan takaran yang sama, dan 4 hari kemudian akan dilakukan pencabutan bibit untuk dilakukan kembali penanaman dengan memberikan jarak antara bibit yang ditanam. Adapun rincian biaya yang diperlukan dalam pemupukan dasar ini, yaitu:

Pupuk urea, Rp. 120.000/50 kg = Rp. 2.400 x 20 kg = Rp. 48.000

z.a, $\text{Rp. } 100.000/50 \text{ kg} = \text{Rp. } 2.000 \times 20 \text{ kg} = \text{Rp. } 40.000$

Ponshka, Rp. 130.000/50 kg= Rp. 2.600 x 20 kg=Rp.52.000

Rp. 140.000

Menurut bapak Aqri, Sebelum dilakukan penanaman padi, sawah terlebih dahulu di semprot dengan racun hama yang disebut besnoit, untuk luas sawah 1 hektar menggunakan sebanyak 3 bungkus besnoit. Harga besnoit sebesar Rp. 55.000/bungkus dan penyemprotan racun hama ini biasanya dilakukan tiga kali

⁹³Baharuddin, *Pekerja Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 01 Juli 2020. 18:15.

sebelum panen. Ongkos dari pembenihan ini yaitu, Untuk sawah seluas 1 hektar maka menggunakan bibit 5 bungkus, 1 bungkusnya berisi 5 kg bibit seharga Rp. 65.000. Jadi, untuk biaya bibit seharga Rp. 325.000. Untuk racun seharga Rp. 55.000 x 3 = Rp. 165.000. Pada proses penanaman padi jika menggunakan jasa penanaman harian maka membutuhkan ongkos Rp. 120.000 /are. Jika jasa penanaman borongan menggunakan tarif Rp. 15.000/are. Secara umum, petani biasa menggunakan jasa borongan karena lebih efisien. Biaya yang dikeluarkan untuk jasa penanaman padi jika menggunakan jasa borongan yaitu Rp. 1.500.000 untuk sawah seluas 1 hektar. Jika menggunakan jasa sebanyak 20 orang, maka biaya sewa jasa sebesar 75.000/orang. Tetapi tidak jarang juga petani pekerja hanya memanggil sanak saudara atau kerabat untuk melakukan penanaman padi sehingga tidak perlu mengeluarkan ongkos jasa penanaman mereka hanya saling membantu satu sama lain.⁹⁴

c. Pemeliharaan

Setelah proses penanaman padi dilakukan, selanjutnya petani pekerja melakukan pemeliharaan tanaman padi, Pada tahap inilah yang sangat penting karena dapat menentukan kualitas hasil padi. Petani penggarap harus selalu turun ke sawah untuk mengontrol lahan yang telah ditanami padi, karena tanaman padi membutuhkan air yang cukup dan pemangkasan rumput juga harus selalu dilakukan agar tidak menghambat pertumbuhan padi. Dan gangguan lain seperti adanya hama harus selalu di jaga agar tidak merusak tanaman padi. Berikut bentuk pemeliharaan yang biasanya dilakukan oleh petani penggarap:

- 1) Setelah satu minggu dilakukan penanaman padi, petani penggarap melakukan penyemprotan racun hama. Ada dua jenis racun yang

⁹⁴Aqri, *Pekerja Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 07 Juli 2020, 16:15.

digunakan yaitu racun ronza dengan harga Rp. 150.000/liter untuk menghalau hama di batang padi seperti ulat batang, maupun belalang dan racun drusban dengan harga Rp. 100.000/liter. Salah satu jenis racun itu digunakan penggarap sesuai dengan kebutuhan penggunaannya'

- 2) Pemupukan pada tahap pertama dilakukan setelah tanaman padi sudah 15 hari. Untuk sawah seluas 1 hektar menggunakan rincian pupuk sebagai berikut:

Pupuk Urea, 2 sak	= Rp. 120.000 x 2 = 240.000
Z.a ,1 sak	= Rp. 100.000 x 1 = 100.000
Sp. 36, 1 sak	= Rp. 160.000 x 1= 160.000
Ponshka, 1 sak	= Rp. 130.000 x 1 = 130.000
	<hr/>
	Rp. 630.000

- 3) Pemupukan tahap kedua dilakukan pada saat usia tanaman padi berusia 45 hari. Tetapi pupuk yang diberikan tidak sebanyak pupuk pada tahap pertama, berikut rinciannya:

Pupuk Urea, 1 sak/50 kg	= Rp. 120.000
Ponshka, 1 sak/50 kg	= Rp. 130.000
	<hr/>
	Rp. 250.000

d. Panen

Setelah melalui proses yang panjang dan tanaman padi berusia kurang lebih 105 hari, maka tanaman padi sudah siap panen. Menurut bapak Kama', sawah yang seluas 1 hektar biasanya menghasilkan gabah kurang lebih 65 karung dengan berat keseluruhannya kurang lebih 7.000 kg di saat musim hujan. Adapun pada saat musim kemarau mengalami penyusutan kurang lebih sebanyak seperlima yaitu 1.400 kg, sehingga yang dihasilkan hanya 5.600 kg. Semua hasil

panen tersebut sudah bersih diterima sebelum hasil gabah dibagi antara penggarap dengan pemilik sawah karena biaya sewa traktornya sudah dikeluarkan. Pembayaran traktor roda empat menggunakan hasil bumi, dimana jika hasil yang dipanen sebanyak 11 karung maka keluar 1 karung untuk biaya traktor. Rasio bagi hasilnya 1/11:10/11. Biasanya biaya untuk traktor ini dikeluarkan terlebih dahulu dan selebihnya baru dibagi antara kedua belah pihak. Adapun setelah hasil panen sudah di bagi antara kedua belah pihak, maka itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing pihak untuk biaya pengangkutannya.

Kalkulasi dari keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak petani penggarap dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.7

Biaya Pengeluaran Pengelolaan Sawah

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Sewa traktor	1 hektar	15.000/are	1.500.000
2.	Benih	5 bungkus	65.000	325.000
3.	Racun:			
	➤ Besnoit	9 bungkus	55.000	495.000
	➤ ronza/ drusban	1 liter	150.000/ 100.000	150.000
4.	Pupuk dasar:			
	➤ Urea	20 liter/kg	2.400	48.000
	➤ Z.a	20 liter/kg	2.000	40.000
	➤ Ponshka	20 liter/kg	2.600	52.000
5.	Pupuk:			
	➤ Urea	3 sak	120.000	360.000

	➤ z.a	1 sak	100.000	100.000
	➤ SP. 36	1 sak	160.000	160.000
	➤ Ponshka	2 sak	130.000	260.000
6.	Jasa penanaman:			
	➤ harian	20 orang	120.000/orang	-
	➤ borongan	20 orang	15.000/are	1.500.000
Total				4.990.000

Sumber: Hasil wawancara olahan peneliti.

4. Sistem Bagi Hasil *Teseng*

Sebagai makhluk sosial, manusia akan senantiasa membutuhkan uluran tangan manusia lainnya. Begitupun pada masyarakat petani padi di Manggalung yakni pemilik dan penggarap lahan, mereka akan saling bekerja sama satu sama lain. Dalam pelaksanaan kerjasama dengan sistem bagi hasil *teseng*, dimulai dengan bertemunya pemilik lahan dengan petani penggarap yang akan mendiskusikan hal-hal seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

Pelaksanaan bagi hasil *teseng* masih berdasarkan dengan hukum adat setempat, sistem tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun. Tidak ada perubahan yang terjadi secara signifikan. Jika tiba waktu panen, pekerja melapor kepada pemilik lahan, tergantung pemilik lahan jika mau hadir saat panen atau tidak hadir. Biasanya pemilik lahan sudah mengetahui berapa gabah yang dihasilkan dari sawah mereka, adapun jika panen padi memiliki hasil bagus, maka gabah akan bertambah dari yang biasanya begitupun sebaliknya maka hal itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan jumlah gabah yang biasanya. Sehingga pemilik lahan ada yang hadir untuk menyaksikan saat panen, atau memilih tidak hadir dan pemilik hanya mempercayakan sepenuhnya sama pekerja yang menggarap lahan mereka.

Pada zaman sekarang, panen padi sudah tidak menggunakan tenaga manusia, melainkan dengan mesin teknologi yaitu mobil traktor roda 4 (*oto passangki*), adapun sewa penggunaan traktor ini dibayar dengan hasil bumi atau gabah dari sawah yang dikelola dengan rasio pembagian 1/11:10/11 rasio perbandingan ini tidak tetap, melainkan mengikuti harga pasaran gabah. Menurut bapak Usman, misalnya hasil panen yang dikelola 11 karung gabah, maka 1 karung gabah dikeluarkan untuk biaya sewa traktor. Kemudian selebihnya, 10 karung gabah yang tersisa baru dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara pada masyarakat petani padi di Manggalung, secara umum hasil wawancara mayoritas memiliki kesamaan dalam pelaksanaan *teseng* baik dari rasio pembagian hasil panen, penanggungan bibit benih dll. Bapak Usman mengatakan:

“Narekko maggalung timo’ki bage tellu kennai nasaba matanre polena resikona, narekko galung bare’ bage dua kennai. Naikia prosesna tesengnge, selamana idi pajjamae tanggung manengngi bansa parakainna galungnge, pakkakasa, bibit sibawa pupu’e. Narekko kebetulang punnana galung engka pakkakasa napassadia umpama dompeng (traktor roda dua), pajjamae tomma makkareso tiwi’i dompengnge. Mappadama narekko iwaja saro dompengnge berupa tenaga tannia doi. Punnana galung tette mattarima bersih, pajjamae maneng missengngi akkareso’e”.⁹⁶

Hal yang sama juga diutarakan oleh bapak Samsuddin, ia mengatakan:

*“Mappada iya engka ubolai dompeng, jadi de’na uakkuraga narekko elo’ni no’galung tauwe. engka to’ biasa pajjama galung iya degaga dompengna, biasa iya nasewai lao dompengngngi galungna.”*⁹⁷

Hal yang sama diutarakan juga oleh bapak H. Arifin, ia mengatakan:

“saya sebagai pemilik sawah, dan penanggungan bibit benih seperti pupuk saya tanggung bersama dengan penggarap, tetapi itu dimasukkan

⁹⁵Usman, *Pekerja Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 07 Juli 2020, 14:15.

⁹⁶Usman, *Pekerja Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 07 Juli 2020, 14:15.

⁹⁷Samsuddin, *Pekerja Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 01 Juli 2020, 19:45.

dalam laba kotor sehingga setelah panen biaya penanggungan tersebut dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian labah bersih baru dibagi antara pemilik dan penggarap lahan dengan perbandingan bagi hasil tetap dengan $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$ saat musim hujan dan $\frac{1}{3}:\frac{2}{3}$ saat musim kemarau, semua tergantung pada pembicaraan di awal.”⁹⁸

Hal yang sama juga di utarakan oleh bapak Saripudding:

“Secara umum kebanyakan pada saat musim kemarau pembagian hasil itu bagi tiga, tetapi saya memakai sistem bagi empat. Misalnya 4 karung gabah hasil panen, maka 3 untuk pekerja 1 untuk pemiliknya karena pertimbangan jauh dari irigasi dan hanya mengandalkan tadah hujan. Jadi resiko gagal panen sangat tinggi sedangkan kerugian hanya ditanggung pekerja.”⁹⁹

Bentuk-bentuk pelaksanaan bagi hasil *teseng* menurut beberapa hasil wawancara diatas dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Pembagian hasil panen tergantung pada musim penanaman padi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dimana pada musim hujan hasil panen padi di bagi dua ($\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$) karena curah hujan stabil. Sedangkan pada musim kemarau hasil panen di secara umum bagi tiga ($\frac{1}{3}:\frac{2}{3}$), tetapi ada juga bagi empat ($\frac{1}{4}:\frac{3}{4}$). Hal itu dikarenakan pada musim kemarau memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terjadinya gagal panen disebabkan pengairan sawah tidak menentu karena hanya mengandalkan irigasi atau curah hujan di penghujung musim hujan dan tidak ada jaminan kalau tidak akan terjadi musim kering kedepannya yang menyebabkan terjadinya gagal panen, dan apabila gagal panen terjadi kerugian baik tenaga, waktu, dan tenaga ditanggung sendiri oleh penggarap lahan.
- b. Pemilik lahan hanya menyediakan lahan, selebihnya ditanggung oleh penggarap baik perawatan, pengairan, bibit, benih, racun hama, pupuk dan

⁹⁸H. Muh. Arifin, *pemilik Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 05 Juli 2020, 13:00.

⁹⁹Saripudding, *Pekerja Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 06 Juli 2020, 17:10.

peralatan. Apabila penggarap tidak memiliki peralatan maka ia melibatkan pihak lain dan menanggung biaya sewa peralatan.

- c. Pemilik lahan menyediakan lahan dan peralatan sedangkan penggarap menyediakan tenaga dan bibit benih.
- d. Penanggung bibit benih oleh kedua belah pihak, dan pengelolaan oleh penggarap lahan. Tetapi jika sudah panen, biaya penanggung bibit benih tersebut di keluarkan terlebih dahulu baru kemudian hasil panen laba bersih baru dibagikan antara kedua belah pihak dengan perbandingan bagi hasil tetap $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$ saat musim hujan dan $\frac{1}{3}:\frac{2}{3}$ atau $\frac{1}{4}:\frac{3}{4}$ saat musim kemarau, semua tergantung pembicaraan.

Berdasarkan Penjelasan di atas mengenai pembagian hasil pertanian pada masyarakat Manggalung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8

Pembagian Hasil Pertanian dengan akad *Teseng*

N o.	Musim Penanaman Padi	Rasio Bagi Hasil	Pemilik Lahan	Petani Penggarap	Keterangan
1.	<i>Galung Bare'</i>	$\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	-
2.	<i>Galung Timo'</i>	$\frac{1}{3}:\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	Sawah yang dekat dengan irigasi
3.	<i>Galung Timo'</i>	$\frac{1}{4}:\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	Sawah jauh dari irigasi desa

Sumber: Hasil wawancara olahan peneliti.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dapat diketahui total pengelolaan sawah seluas 1 hektar yang harus dikeluarkan pekerja sebanyak Rp. 4.990.000 dan hasil panen sawah seluas 1 hektar mendapatkan kurang lebih 7.000 kg. Jika di asumsikan harga padi disaat panen sebesar 4.500/kg, maka padi yang dihasilkan pada musim hujan yaitu $7.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 4.500 = \text{Rp. } 31.500.000$ dan musim kemarau

sebanyak 5.600 kg x Rp. 4.500 = Rp. 25.200.000. Adapun bagian yang didapatkan masing-masing pihak dengan akad mukharabah dapat dilihat sebagai berikut:

1) pada saat musim hujan dengan rasio $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$:

- a) pemilik lahan = Rp. 31.500.000/2 = 15.750.000
- b) Pekerja lahan = Rp. 31.500.000/2 = 15.750.000 - 4.990.000 = 10.760.000

2) Musim Kemarau dengan rasio $\frac{1}{3}:\frac{2}{3}$

- a) Pemilik lahan = 25.200.000 x $\frac{1}{3}$ = 8.400.000
- b) Pekerja lahan = 25.200.000 x $\frac{2}{3}$ = 16.800.000 - 4.990.000 = 11.810.000

3) Rasio pembagian $\frac{1}{4}:\frac{3}{4}$:

- a) pemilik lahan = Rp. 25.200.000 x $\frac{1}{4}$ = 6.300.000
- b) Pekerja lahan = Rp. 25.200.000 x $\frac{3}{4}$ = 18.900.000 - 4.990.000 = 13.910.000

D. Pandangan Islam Terhadap Praktik Teseng di Desa Manggalung

Sebagai seorang Muslim, kita di tuntut agar senantiasa selalu berusaha dan bekerja agar menjadi manusia yang produktif, tidak berpangku tangan dan bermalas-malasan. Dalam konteks pertanian, baik pemilik lahan maupun penggarap di tuntut agar saling memberikan manfaat satu sama lain, Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا
أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ¹⁰⁰

Artinya:

“Dari Abu Hurairah R.A berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mempunyai tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka tahanlah tanahnya”.

¹⁰⁰ Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, Ensiklopedia Hadis 4: *Shahih Muslim 2* (Cet ; I, Jakarta: House Of Almahira, 2012), h. 524.

Banyak berbuat kebaikan di antara sesama tentu sangat di anjurkan oleh syariat. Kita dituntut untuk menyeimbangkan antara kehidupan akhirat dan duniawi. Tidak hanya mementingkan perkara ibadah kepada Allah swt, lalu kemudian pekerjaan duniawi di lalaikan ataupun sebaliknya. Sama halnya dengan bekerja mencari nafkah bagi seorang petani pada masyarakat Manggalung, disamping memenuhi kewajiban seorang muslim untuk senantiasa bekerja dan mencari nafkah tentu silaturahmi atas kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap terjalin dengan erat yang membangkitkan semangat tolong menolong antara mereka. Berikut analisa terhadap bagi hasil *teseng* pada masyarakat Manggalung ditinjau dari berbagai aspek.

1. **Faktor Pendorong Terjadinya Kerjasama Antara Pelaku Akad Bagi Hasil *Teseng***

Kadar rezeki yang diberikan Allah swt berbeda-beda kepada setiap orang, ada yang diberikan lebih dan ada yang kurang itu merupakan cobaan bagi mereka. Sama halnya pada masyarakat Manggalung karena tingkat taraf ekonomi yang berbeda-beda sehingga hal tersebut yang melatarbelakangi terjadinya kerja sama antara pemilik dan penggarap lahan.

Hal tersebut tentu sudah sejalan dengan syariat Islam dimana sebagai seorang Muslim, tentu kita dituntut untuk senantiasa berusaha dan saling tolong menolong satu sama lain. firman Allah dalam QS. Al- Maidah/5: 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ..

Terjemahannya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹⁰¹

¹⁰¹Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kementrian Agama: Direktorat urusan Agama Islam, 2012), h. 106.

2. Subjek dan Objek Akad bagi hasil *Teseng*

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* menyatakan rukun *muzara'ah* yaitu: pelaku akad (pemilik lahan dan penggarap), objek (benih, lahan, dan hasil pertanian), dan *Shighat* (ijab dan kabul).

a. Pelaku Akad

1) Pemilik Lahan

No	Nama	Umur
1.	Saturi	65
2.	Kamaruddin	45
3.	Iskandar	70
4.	Rustang	47
5.	Syamsir	31
6.	H. Muh Arifin	67
7.	H. Jannah	41
8.	H. Mustari	53
9.	Munir	39
10	Bahtiar	47

2) Petani Penggarap

No	Nama	Umur
1.	Usman	39
2.	Kama'	43
3.	Amboe	57
4.	Surullah	50
5.	Samsudding	44
6.	Baharudding	57

7.	Tombong	62
8.	Firman	31
9.	Aqri	26
10.	Saripuding	40

Berdasarkan syarat-syarat bagi hasil *mukhabarah*, pelaku akad yakni pemilik lahan dan petani penggarap di Manggalung sudah memenuhi syarat orang yang berakad dimana syaratnya ialah *baligh* dan berakal.

b. Objek *Teseng*

1) Objek *muzara'ah* dan *mukhabarah*:

- a) Benih, diketahui jenis benih dan menurut kebiasaan bila ditanam dapat tumbuh dan menghasilkan. Benih tanaman padi *galung Timo'* dan *galung Bare'* berbeda. Menurut hasil wawancara sebelumnya sudah diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing bibit benih. Adapun pemilihan bibit benih diberikan sepenuhnya kepada penggarap sawah yang sudah memiliki pengalaman.
- b) Lahan dapat ditanami atau diolah, diketahui batas-batasnya dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada petani. Pada masyarakat Manggalung terdapat dua kali panen dalam setahun, dan tidak semua lahan dapat dikelola pada saat *magggalung Timo'* (musim kemarau). Pemilik lahan biasanya memberitahukan hal tersebut sebelum perjanjian atau penggarap sudah mengetahui hal itu sebelumnya karena mengetahui letak area sawah, sehingga semuanya jelas di awal perjanjian. Bapak Rustang mengatakan:

*"Sebelum isepakati kerja samae, ipannessa memengni siaga are loanna galungnge ijama, sibawa punnana galung mattarima wassele mapaccing, naikiya pajjamana galung misseng manengngi jamang-jamang'e"*¹⁰²

¹⁰²Rustang, *Pemilik Lahan*, Wawancara di desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. 01 Juli 2020, 20:30.

- c) Objek *mukhabarah* disyaratkan harus jelas, apakah objek tersebut berupa jasa petani maupun manfaat lahan.¹⁰³ Tentunya yang menjadi objek bagi hasil *teseng* menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat petani padi di Manggalung adalah manfaat lahan, dimana penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan, benih bibit, dan perawatan lahan yang ia kelola.

Dari hasil observasi dan wawancara mengenai objek *mukhabarah* dalam hal ini bagi hasil *teseng* yang ditinjau dalam pandangan Islam sudah terpenuhi dan memiliki kejelasan dalam pelaksanaannya.

3. Proses Pelaksanaan Bagi Hasil *Teseng*

Dalam hukum Islam, Pelaksanaan kerja sama antara pengarap dan pemilik lahan pertanian merupakan bagian dari bentuk *syirkah*, dimana satu pihak menyediakan lahan dan pihak lain sebagai penggarap tanah berdasarkan prinsip bagi hasil.¹⁰⁴

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.¹⁰⁵ Akad *mukhabarah* tersebut sejalan dengan praktik *teseng* yang dilakukan oleh masyarakat Manggalung. Tetapi masyarakat setempat rata-rata tidak mengetahui bagi hasil *mukhabarah*, yang mereka pahami hanya bagi hasil *teseng*. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh para ulama dalam membolehkan akad *mukhabarah* adalah hadis Nabi:

¹⁰³H. Maulana Hasanuddin dan H. Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, h. 170.

¹⁰⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 218.

¹⁰⁵Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. 2, h. 117.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِرُحَيْمٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ¹⁰⁶

Artinya:

“Ahmad bin Hanbal dan Zuhair bin Harb menyampaikan kepada kami - lafaz milik zuhair- dari Yahya al-Qathan, dari Ubaidullah, Nafi’ mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah Saw. memperkerjakan penduduk khaibar dengan upah setengah dari hasil tanah tersebut berupa kurma atau gandum”.

Pembagian hasil panen menggunakan rasio 1/2:1/2 pada musim hujan dan untuk penanaman padi di musim kemarau menggunakan rasio perbandingan 1/3:2/3. Pembagian hasil tersebut sudah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad saw, sebagaimana hadis berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانُوا يَزْرَعُونَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ)¹⁰⁷

Artinya:

Dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa arab senantiasa mengolah tanahnya dengan rasio bagi hasil sepertiga, seperempat, atau setengah dari hasil panen maka Rasulullah pun bersabda: Hendaklah dia menanaminya atau memberi izin saudaranya untuk menanaminya secara cuma-cuma. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahananlah tanahnya (H.R Imam Muslim).

Adapun rukun dari akad *teseng* ini sudah terpenuhi, namun salah satu syaratnya tidak terpenuhi yakni pada saat akad tidak ada ketentuan terkait waktu berakhirnya kerja sama dengan akad *teseng*, karena hanya berdasarkan kecocokan antara pemilik dan penggarap lahan. Dalam tinjauan fiqh Islam, akad seperti yang disebutkan sebelumnya jika ditinjau

¹⁰⁶Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits: Sahih Muslim 2*, (Cet. 1; Jakarta: Almahira, 2012), h. 25, Hadis ke-3963.

¹⁰⁷Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ensiklopedia Hadits 4: Shahih Muslim 2* (Cet; 1, Jakarta: Almahira, 2012).

menurut keabsahannya termasuk akad fasid. Akad *Fasid* yaitu akad yang rukunnya terpenuhi tetapi salah satu syaratnya tidak terpenuhi.¹⁰⁸

Teseng merupakan adat kebiasaan masyarakat Manggalung yang di lakukan secara turun temurun, adat dalam istilah fiqh disebut '*urf*'. Fuqaha dalam mazhab fikih sepakat menjadikan '*urf*' secara umum sebagai dalil hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun syarat '*urf*' sebagai sumber hukum yang dikemukakan oleh para *ushuliyyun* sebagai berikut:

- 1) Kebiasaan tersebut harus berlaku secara umum. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, *teseng* sudah berlaku secara umum di tengah masyarakat dimana ketentuan dan pelaksanaan yang terkait bagi hasil *teseng* sudah diketahui secara umum dan diikuti oleh setiap masyarakat yang terkait.
- 2) '*Urf*' yang telah berlaku dan berjalan sejak lama. *Teseng* sudah ada sejak zaman dahulu kala dan dilakukan secara turun-temurun.
- 3) Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang paparkan sebelumnya, mayoritas masyarakat memberikan informasi yang sama, baik ketentuan maupun pelaksanaan *teseng*.
- 4) Tidak ada teks hukum dalam permasalahan tersebut.¹⁰⁹ Bagi hasil *Teseng* sejalan dengan akad *mukhabarah* sehingga ketentuannya mengikuti dasar hukum dibolehkannya akad *mukhabarah*.

¹⁰⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 78.

¹⁰⁹Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fikihi al- Amm* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1978 M/1419 H), h. 873-881.

Berdasarkan dengan syarat-syarat yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *teseng* sudah memenuhi keempat syarat tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum syariat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai praktik bagi hasil maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil *teseng* yang di praktikkan secara umum dalam masyarakat sejalan dengan akad *mukhabarah* yaitu pemilik lahan menyerahkan hak pengelolaan lahannya kepada pekerja lahan dengan biaya proses dan bibit benih ditanggung oleh pekerja lahan. Rasio perbandingan bagi hasil yang dilakukan tergantung pada musim penanaman padi dan tingkat resiko yang dihadapi. Pelaksanaan bagi hasil teseng masih dilakukan sesuai dengan adat setempat, dimana pada saat ijab dan qabul, perjanjian tidak menghadirkan saksi dan lamanya waktu perjanjian tidak ditetapkan hal tersebut hanya berdasarkan pada kepercayaan dan kecocokan antara kedua belah pihak. Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya kerjasama bagi hasil teseng ini yaitu faktor ekonomi dan sosial.
2. Pandangan Islam mengenai praktik *teseng* ini adalah sah karena rukun dalam perjanjian ini sudah terpenuhi. Dalam perjanjian ini sudah jelas ketentuan objek dan subjek serta rasio pembagian hasil panen sebelum kerja sama ini dimulai. Namun ditinjau dari keabsahan akadnya bagi hasil *teseng* ini termasuk akad yang *fasid* karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi yakni penentuan lamanya kerja sama berlangsung, adapun akad “*Teseng*” jika dipandang sebagai al-‘*Urf* maka itu dapat diterima karena telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Secara keseluruhan banyak manfaat yang diperoleh dari

pelaksanaan bagi hasil *teseng* ini dimana didalamnya terkandung sikap saling *ridha* dimana transparansi dalam pelaksanaan akadnya terlaksana, nilai tolong menolong dan saling memberi manfaat antara kedua belah pihak dimana pemilik menyediakan lahan untuk dikelola dan penggarap lahan menyediakan modal tenaga.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menganalisa hasil penelitian terkait pelaksanaan bagi hasil *teseng* pada masyarakat Manggalung Kecamatan Mandalle dan Kabupaten Pangkep, peneliti menyarankan kepada masyarakat Manggalung agar sikap yang senantiasa menjunjung tinggi solidaritas dan gotong royong di antara mereka dapat dipertahankan.

Disarankan kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan bagi hasil *teseng* yakni pemilik dan penggarap lahan agar menghadirkan saksi dalam pelaksanaan perjanjian untuk menghindari perselisihan yang akan terjadi kedepannya.

Disarankan kepada masyarakat Manggalung agar senantiasa tetap memperhatikan rambu-rambu syariat Islam apabila akan melakukan kerjasama antar sesama dimana tidak lebih menguntungkan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj. *Sahih Muslim*. Cet; 1, Riyadh: Baitul al Afkar ad-Dauliyah, 1998 M/1419 H.
- al-Bugha, Mustafa Dib. *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha Fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus; Dar Imam al-Bukhari, t.th. Dikutip dalam Mohammad Mufid. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2016.
- Al-Mundzir, Al-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Cet. 1; Surakarta: Insan Kamil Solo, 2012.
- al-Syarbini, Syamsudin Muhammad ibn al-Khatib. “Mughni Al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfazh al-Minhaj”, dalam Isnawati Rais dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*. Cet.I; [t.d].
- an-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Ensiklopedia Hadits; Sahih Muslim 2*. Cet. 1; Jakarta: Almahira, 2012.
- al-Naisyaburi, Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Qusyairi. *Shahih Muslim*, Juz 5. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ash Shidiqie, Jannahar Saddam. “Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. VII, No. 1 (Juni 2017).
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. *al-Madkhal al-Fikihi al- Amm*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1978 M/1419 H.
- Bungin, H. M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2013.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, t.th. Dikutip dalam Mohammad Mufid. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djazuli, H. A. *Ilmu Fiqh*, edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2005.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Analisis Data*. Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Firman dan Muh. Arif. “Muzara’ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan”, *Al Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 2 (September 2018). <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index> (Diakses 10 Februari 2020).

- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Cet.1; Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Abdul. “Kearifan Lokal dalam Ekonomi Islam: Studi Atas Aplikasi al-Urf Sebagai Dasar Adopsi”, *Jurnal Akademika*, Vol. 8, No. 01 (Juni 2014).
- Habibie, Ramadhani Alfin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil dari Lahan Plasma Sawit”, *Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 10, No. 1 (2019).
- Hasanuddin, H. Maulana dan H. Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah, Musyarakah*. Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar maju, 1990.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementrian Agama: Direktorat urusan Agama Islam, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2001.
- Mubyarto. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005.
- Muhyuddin, Nurlina T, dkk. *Metodologi Penelitian Ekonomi Sosial*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017.
- Mutalib, Abdul. “Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah pada Usaha tani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur”, *JIME*, Vol.1, No. 2, (Oktober 2015).
- Nurmadany, Rizka. *Jurnal Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kab. Saleman*, 19 (Desember 2016), h. 1 . <https://ejournal.uajy.ac.id/11514/1/jurnal%20HK10859.pdf> (Diakses 26 November 2019).
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam Terj. Abu Sa'id Al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid*. Jakarta: Rabbani Press, 2000.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*, ed. Li Sufyana dkk. Cet. 62; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *fiqih sunnah jilid 5*. Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009.

Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah*. Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Soekartwi. *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*. Cet. VI; Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2001.

Sudaryono. *Metode penelitian*. Cet 2; Depok: Rajawali Pers, 2018.

Suhendi, H. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. 11; Depok: Rajawali Pers, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, Pasal 1.

Wahyuni, Andi Sri. “Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat Syariah”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4, No. 3 (Desember 2013), h. 467. <https://scholar.google.co.id> (26 November 2019).

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

MANUSKRIP

Sebagai seorang Muslim tentu kita perlu memperhatikan dua hal penting dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini, yaitu hubungan manusia dengan Allah swt dan hubungan manusia dengan manusia lainnya karena manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berada dalam lingkungan pergaulan dengan manusia lainnya. Adapun kadar rezeki yang diberikan Allah swt berbeda-beda kepada setiap orang, ada yang diberikan lebih dan ada yang kurang itu merupakan cobaan bagi mereka. Sama halnya pada masyarakat Manggalung Karena tingkat taraf ekonomi yang berbeda-beda sehingga hal tersebut yang melatar belakangi terjadinya kerja sama antara pemilik dan penggarap lahan. Bagi hasil yang secara umum dilakukan di Manggalung adalah bagi hasil *Teseng* dimana kerjasama antara pemilik dan pekerja lahan dengan bibit benih ditanggung oleh petani pekerja. Bagi hasil *Teseng* tersebut sejalan dengan kerjasama *mukhabarah* dalam fiqh Islam. Untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam terkait dengan bagi hasil *Teseng* tersebut, berikut pertanyaan yang diajukan peneliti kepada informan yakni masyarakat petani padi di Manggalung dalam hal ini pemilik dan pekerja lahan.

Informan: Pemilik Lahan

1. Siapa nama lengkap dan berapa umur ibu/bapak?
2. Berapa Luas sawah yang dimiliki oleh ibu/bapak?
3. Apa saja bentuk-bentuk kerjasama pertanian yang dilakukan di Manggalung?
4. Berapa kali panen yang dilakukan ibu/bapak dalam setahun, dan berapa rasio bagi hasilnya?
5. Apa alasannya memberikan sawah ibu/bapak untuk dikelola oleh petani pekerja dengan akad *teseng*?
6. Bagaimana alur pelaksanaan perjanjian bagi hasil *teseng*?

7. Berapa lama jangka waktu kerjasama bagi hasil *teseng*?
8. Saat terjadi gagal panen, siapa yang menanggung kerugian?
9. Siapakah yang menanggung bibit benih pertanian?
10. Saat melakukan akad, apakah menggunakan saksi! alasannya?
11. Pada saat waktu panen, apakah ibu/bapak diberitahukan terlebih dahulu dan hadir untuk menyaksikan proses panennya?
12. Apakah ibu/bapak mengetahui bagi hasil pertanian yang dilakukan dalam Islam?

Informan: Pekerja Lahan

1. Siapa nama lengkap dan berapa umur bapak?
2. Berapa Luas sawah yang dikelola oleh bapak dan apakah ada sawah atas kepemilikan sendiri?
3. Apa saja bentuk-bentuk kerjasama pertanian yang dilakukan di Manggalung?
4. Berapa kali panen yang dilakukan bapak dalam setahun, dan berapa rasio bagi hasilnya?
5. Apa alasan bapak mengelolah sawah yang diberikan oleh pemilik lahan dengan akad *teseng*?
6. Bagaimana alur pelaksanaan perjanjian bagi hasil *teseng*?
7. Berapa lama jangka waktu kerjasama bagi hasil *teseng*?
8. Bagaimana proses pengelolaan lahan?
9. Berapa biaya yang dikeluarkan saat mengelolah sawah?
10. Pada saat akan melakukan panen, apakah pemilik lahan diberitahukan terlebih dahulu?
11. Saat melakukan akad, apakah menggunakan saksi! alasannya?
12. Apakah bapak mengetahui bagi hasil pertanian yang dilakukan dalam Islam?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 3186/S.01/PTSP/2020
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Bupati Pangkep

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 2448/EB.I/PP.00.0/6/2020 tanggal 02 Juni 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NUR ASNITA WULANDARI**
 Nomor Pokok : 90100116119
 Program Studi : Ekonomi Islam
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL "MATTESENG" PADA MASYARAKAT MANGGALUNG KECAMATAN MANDALLE KABUPATEN PANGKEP "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Juli s/d 05 Agustus 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 30 Juni 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 PTL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. IFFAH RAFIDA DJAFAR, ST., MT.
 Nip : 19741021 200903 2 001

Tembusan Yth
 1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
 2. Perlinggal.

SMAP PTSP 01-07-2020



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231





PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40 ☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 128/IPT/DPMPTSP/VI/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep.
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama	: NUR ASNITA WULANDARI
Nomor Pokok	: 90100116119
Tempat/Tgl. Lahir	: Manggalung / 01 Agustus 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Manggalung Kel/Desa Manggalung Kac. Mandalle Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Tempat Meneliti	: Manggalung Kec. Mandalle Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Survey dengan Judul :

“Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil ‘Teseng’ Pada Masyarakat Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep”

Lamanya Penelitian : 1 Juli 2020 s/d 5 Agustus 2020

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 7 Agustus 2020



Tembusan Kepada Yth :
 1. Bapak Bupati (Sebagai Laporan);
 2. Kesbang;
 3. Arsip;



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Drs. Bashtiar, M.Si
 Penjabat Tk. I
 Nip. 19760930 199511 1 001



(Area lahan sawah dan rumah penduduk di Desa Manggalung)





(Wawancara bersama pemilik lahan)



(Wawancara bersama pemilik lahan)





(Wawancara bersama pekerja lahan)

RIWAYAT HIDUP



NUR ASNITA WULANDARI, dilahirkan di Kabupaten Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan) tepatnya di Desa Manggalung Kecamatan Mandalle pada tanggal 1 Agustus 1998. Anak kedua dari empat bersaudara dan merupakan anak kandung dari pasangan Usman dan Aisyah. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD 16 Manggalung di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep pada tahun 2010. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep dan tamat pada tahun 2013, kemudian peneliti melanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Ar-Rahman DDI Galla Raya dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Ekonomi Islam. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR